

**KONSEP PEMANFAATAN BARANG GADAI MENURUT
IBNU QUDAMAH DAN RELEVANSINYA TERHADAP
BISNIS PEGADAIAN SYARIAH KONTEMPORER**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat Guna Mencapai
Gelara Sarjana Ekonomi Islam Pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum



Disusun Oleh :

JULIANA
10625003976

**PROGRAM S1
JURUSAN EKONOMI ISLAM**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
PEKANBARU
RIAU
2010**

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “ Konsep Pemanfaatan Barang Gadai Menurut Ibnu Qudamah dan Relevansinya Terhadap Bisnis Pegadaian Syariah Kontemporer”

Ditulis berdasarkan latar belakang bahwa gadai adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, Ibnu Qudamah menyatakan bahwa barang yang digadaikan berupa hewan yang ditunggangi dan diperah boleh dimanfaatkan oleh *murtahin*. Berbeda dengan pegadaian sekarang barang yang digadaikan hanya barang-barang tertentu dan tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* walaupun ada izin dari *rahin*. Oleh karena itu penulis tertarik untuk lebih mendalami tentang permasalahan konsep pemanfaatan barang gadai menurut Ibnu Qudamah dan pendapat-pendapat beliau yang spesifik yang mempunyai ciri khusus yang mungkin relevan untuk diaplikasikan dalam praktek pegadaian kontemporer.

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah : Bagaimana konsep pemanfaatan barang gadai menurut Ibnu Qudamah dan Bagaimana Relevansi pandangan Ibnu Qudamah tentang konsep pemanfaatan barang gadai terhadap bisnis pegadaian syariah kontemporer.

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah studi kepustakaan (*Library research*) dimana data dan sumber datanya diperoleh dari penelaahan terhadap literature-literatur yang sesuai dengan permasalahan. Dalam memperoleh data penulis menggunakan data Primer yaitu kitab *al-mughni*, data sekunder diambil dari buku yang berkaitan dengan permasalahan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep Ibnu Qudamah tentang pemanfaatan barang gadai, dan relevansi pemanfaatan barang gadai terhadap bisnis pegadaian kontemporer.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa menurut Ibnu Qudamah tidak boleh mengambil manfaat dari barang yang digadaikan, kecuali barang gadaian yang bisa ditunggangi dan diperas tetapi selain dari barang yang bisa diperas dan ditunggangi penerima gadai bisa juga mengambil manfaat dari barang yang digadaikan dengan syarat : adanya izin dari orang yang menggadaikan.

Pemilik barang masih tetap berhak mengambil manfaat dari barang yang digadaikan, bahkan manfaatnya tetap kepunyaan pemiliknya dan kerusakan menjadi tanggungan pemilik, kecuali yang digadaikan itu budak, maka tidak boleh mengambil manfaatnya.

Jenis pemanfaatan barang yang dilarang adalah pemanfaatan yang mengurangi nilai barang gadai, bentuk pemanfaatan barang yang menjadi pokok pembicaraan para ulama fikih adalah pemanfaatan yang bersifat *Tasarruf*, yaitu pemanfaatan yang dapat menghabiskan nilai materil dari barang yang menjadi objek transaksi.

Hasil penelitian setelah mengadakan penganalisaan, maka penulis dapat mengatakan bahwa dalam konsep pemanfaatan barang gadai di lembaga pegadaian syariah mempunyai persamaan dengan konsep pegadaian menurut Ibnu Qudamah yaitu terletak pada akad, dari segi pemanfaatan barang yang digadaikan, pemilik barang (*rahin*)

Masih berhak mengambil manfaat barang yang digadaikan. Selain itu juga mempunyai perbedaan yang terletak pada barang yang digadaikan (*marhun*).

DAFTAR ISI

KATA PENGANTARi
ABSTRAKiv
DAFTAR ISIvi
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang 1
B. Batasan Masalah8
C. Rumusan Masalah9
D. Tujuan dan Kegunaan9
 E. Metode Penelitian10
F. Sistematika Penulisan11
 BAB II BIOGRAFI IBNU QUDAMAH	
A. Biografi Hidup Ibnu Qudamah.....	13
B. Guru-guru Ibnu Qudamah	18
 C. Karya-karya Ibnu Qudamah	22
 BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG GADAI	
A. Pengertian Gadai25
B. Rukun Gadai29
C. Syarat Gadai30
D. Akad Perjanjian Gadai	33

E. Pemanfaatan dan Penjualan barang gadai.....	35
F. Berakhirnya akad Gadai.....	36

BAB IV KONSEP PEMANFAATAN BARANG GADAI MENURUT IBNU QUDAMAH DAN RELEVANSINYA TERHADAP BISNIS PEGADAIAN SYARIAH

A. Konsep pemanfaatan barang gadai	
Menurut Ibnu Qudamah	42
B. Relevansi pandangan Ibnu Qudamah tentang konsep	
Pemanfaatan barang gadai dengan pegadaian syariah	
Kontemporer	57

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	65
B. Saran	66

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kegiatan sehari-hari, uang selalu saja dibutuhkan untuk membeli atau membayar berbagai keperluan. Dan yang menjadi masalah terkadang kebutuhan yang ingin dibeli tidak dapat dicukupi dengan uang yang dimilikinya. Kalau sudah demikian maka mau tidak mau kita mengurangi untuk membeli berbagai keperluan yang dianggap tidak penting, namun untuk keperluan yang sangat penting terpaksa harus dipenuhi dengan berbagai cara seperti meminjam dari berbagai sumber dana yang ada.

Jika kebutuhan dana dan jumlahnya besar, maka dalam jangka pendek sulit untuk dipenuhi, apalagi jika harus dipenuhi lewat lembaga perbankan. Namun jika dana yang dibutuhkan relatif kecil tidak jadi masalah, karena banyak tersedia sumber dana yang murah dan cepat, mulai dari pinjaman ke tetangga, tukang ijon sampai kepinjaman dari berbagai lembaga keuangan lainnya.

Bagi mereka yang memiliki barang-barang berharga kesulitan dana dapat segera dipenuhi dengan cara menjual barang berharga tersebut, sehingga sejumlah uang yang diinginkan dapat terpenuhi.¹ Namun resikonya barang yang telah dijual akan hilang dan sulit untuk kembali. Kemudian jumlah uang yang

¹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), Cet ke-1, h..245.

diperoleh terkadang lebih besar dari yang diinginkan sehingga dapat mengakibatkan pemborosan.

Untuk mengatasi kesulitan yang ada diatas dimana kebutuhan dana dapat dipenuhi tanpa kehilangan barang-barang berharga, maka masyarakat dapat menjaminkan barang-barangnya ke lembaga tertentu. Barang yang dijaminkan tersebut pada waktu tertentu dapat ditebus kembali setelah masyarakat melunasi pinjamannya. Kegiatan menjaminkan barang-barang berharga untuk memperoleh sejumlah uang dan dapat ditebus kembali setelah masyarakat melunasi pinjamannya. Kegiatan menjaminkan barang-barang berharga untuk memperoleh sejumlah uang dan dapat ditebus kembali setelah jangka waktu tertentu tersebut kita sebut dengan nama usaha gadai.

Dengan usaha gadai masyarakat tidak perlu takut kehilangan barang-barang berharganya dan jumlah uang yang diinginkan dapat disesuaikan dengan harga barang yang dijaminkan. Perusahaan yang menjalankan usaha gadai disebut perusahaan pengadaian dan secara resmi satu-satunya usaha gadai di Indonesia hanya dilakukan oleh Perum Pegadaian.

Transaksi hukum gadai dalam fikih Islam disebut ar-rahn adalah suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan utang. Pengertian ar-rahn dalam bahasa Arab adalah ats-tsubut wa ad-dawam yang berarti “tetap” dan “kekal”, seperti dalam kalimat maum rahin, yang berarti air yang tenang.

Sedangkan pengertian “tetap” dan “kekal” dimaksud, merupakan makna yang tercakup dalam kata *al-habsu*, yang berarti menahan. Kata ini merupakan makna yang bersifat materiil. Karena itu, secara bahasa kata *ar-rahn* berarti “menjadikan sesuatu barang yang bersifat materi sebagai pengikat utang”.² Gadai (*ar-rahn*) adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.³

Adapun pengertian gadai (*rahn*) menurut Ibnu Qudamah dalam Kitab *al-Mughni Syarh al-Kabir* sebagai berikut:

الْمَالُ الَّذِي يُجْعَلُ وَثِيقَةً بِالَّذِينَ لِيُسْتَوْفَى مِنْ ثَمَنِهِ إِنْ تَعَدَّرَ اسْتِيفَاؤُهُ مِمَّنْ هُوَ عَلَيْهِ

Artinya : “ Suatu benda yang dijadikan kepercayaan suatu utang, untuk dipenuhi dari harganya, bila yang berhutang tidak sanggup membayar utangnya”.⁴

Pemikiran Ibnu Qudamah mengatakan barang yang boleh digadai adalah semua barang yang diperjual belikan. Lebih lanjut Ibnu Qudamah menjelaskan tentang pengertian terminologi yang ada dalam syariah yaitu harta yang dijadikan jaminan terhadap hutang yang digunakan untuk mengganti nilai hutang jika sipegadai tidak mampu untuk melunasi hutangnya. Hukumnya

² Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), Cet. ke-1, h. 1.

³ Muhamad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani, 2001), Cet. ke-1, 128.

⁴ Ibnu Qudamah, *al-Mughni Syarh al-Kabir*, (Beirut : Darul Fikri), Cet ke- 4. tt.

menurut Ibnu Qudamah adalah jaiz (boleh) berdasarkan al-Quran, Sunah dan Ijmak.⁵

Gadai menurut Ibnu Qudamah dibolehkan baik kepada orang yang bermukim pada suatu tempat maupun orang yang berpergian. Gadai hukumnya tidak wajib didalam hutang karna penafsiran surat al-Baqarah ayat 283 tentang gadai hanya berupa anjuran, yang kemudian ditutup dengan ayat jika seorang mempercayai orang lain dalam hutang maka tidak masalah untuk tidak memberikan sesuatu yang digadaikan. Gadai menurut Ibnu Qudamah biasanya terjadi dalam tiga hal:

1. Gadai terjadi setelah hak

Yaitu hak seseorang untuk menerima kembali piutang yang diberikan kepada orang lain dengan cara menerima barang gadaian.

2. Gadai terjadi bersamaan akad yang diwajibkan dalam hutang

Contohnya si A menjualkan bajunya kepada si B dengan sejumlah uang, dalam waktu 1 bulan dengan cara hutang, dan si B mengadaikan hartanya kepada si A lalu si A menerimanya.

3. Gadai sebelum hak

Contohnya seseorang yang telah meletakkan hartanya kemudian dia meminjam uang sesuai dengan nilai hartanya.⁶

⁵ Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, (Kairo : Hajar li al-Thiba'ah, 1992), h. 442

⁶ *Ibid.* h. 446.

Gadai menurut Ibnu Qudamah hanya boleh dari barang yang hukumnya boleh untuk diserahkan terimakan. Adapun cara serah terima barang kalau barangnya bersifat harta bergerak maka serah terimanya dengan menyerahkan barang tersebut, seperti kalau ringan maka bisa diambil langsung dengan tangan, sedangkan jika perlu ditimbang maka serah terimanya dengan penyesuaian timbangan. Kalau barangnya tidak bergerak maka serah terimanya adalah dengan mengosongkan kemudian menyerahkannya dengan cara seperti menyerahkan kunci bagi rumah barang tersebut dan memberikan hak barang tersebut kepada yang menerima gadai.

Adapun pendapat lain yang dikutip oleh Ibnu Qudamah bahwa penyerahan barang gadai itu tergantung isi dari perjanjian. Adapun orang yang mengadaikan haruslah seseorang yang bebas, mukalaf dan berakal bukan orang yang terhalang atau mahjur atau tidak cakap seperti anak kecil, orang gila, orang bodoh atau orang yang pailit. Objek menurut Ibnu Qudamah adalah semua barang yang boleh diperjual belikan atau boleh juga di gadaikan.⁷

Dalam penggunaan barang gadai oleh pegadaian terdapat perbedaan pandangan di kalangan muslim. Menurut Mazhab Hanafi dan Hambali, penerima pegadaian boleh memanfaatkan barang yang menjadi jaminan untuk utang atas izin pemiliknya, karena pemilik barang itu berhak mengizinkan

⁷ *Ibid.* h. 447

kepada siapa saja yang ia kehendaki untuk menggunakan hak miliknya. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Saw dari Abu Hurairah bahwa.

يَهْلِي اللَّهُ عِلًّا اللَّهُ ص وَقَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُ ، وَابْنُ الدَّرِثِمِ بْنِ مَرْهُوَ طَهْرِي رَكِبَ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ : وَسَلَّمَ
لِنَفَقَتِهِ يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ أَيُّ الذِّوَعِ ، نَابِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُوَ

Artinya : “ Dari Abu Hurairah ia berkata : Rasullulah SAW, telah bersabda;*Binatang tunggangan boleh ditunggangi sebab memberi nafkahnya, apabila ia digadaikan dan susunya diminum oleh sebab memberi nafkahnya bila digadaikan, dan wajib bagi orang yang menunggangi serta meminumnya memberi nafkah*” .⁸

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1150, gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada orang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang yang berpiutang lainnya; dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.⁹

⁸ Imam Abilah, *Shahih Bukhari*, (Beirut : Kitabul Ilmiah, 1992), juz 3, h. 162.

⁹ Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2005), Cet. ke-5, h.744.

مهلو با او كان مر كوا باء, الا ماشىهن من الرهن بالمرات ولا ينتفع
العلف درق كبا و يحلب بفير

Artinya : “ Ibnu Qudamah menjelaskan tidak boleh bagi orang yang menerima barang gadaian memakainya dengan cara apa pun kecuali hewan yang ditunggangi dan perahan susu, maka ia boleh menunggaginya dan pemerah susu dengan sekedar ukuran memberi makanan binatang itu (tidak melebihi kapasitas)”.¹⁰

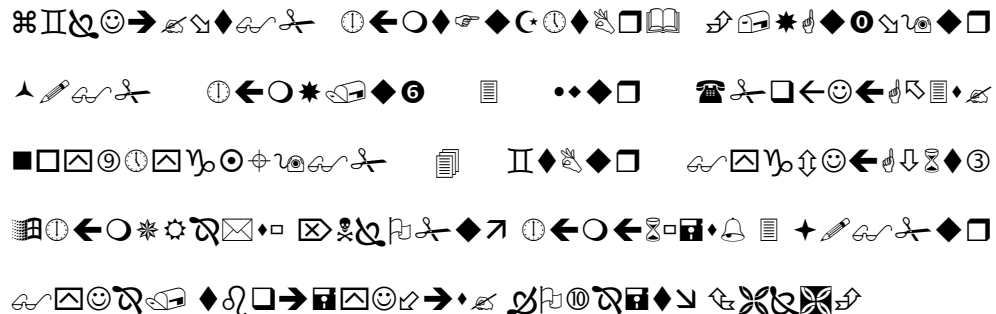
Gadai secara hukum dibolehkan asalkan tidak terkandung unsur-unsur ribawi. Bahkan beberapa kali tercatat Rasulullah SAW mengadaikan harta bendanya,. Rasulullah SAW pernah ditanya tentang seseorang menggadaikan kambingnya, bolehkah kambingnya diperah. Rasulullah mengizinkan sekedar untuk menutup biaya pemeliharaan. Artinya Rasulullah SAW mengizinkan kita mengambil keuntungan dari barang yang digadaikan untuk menutup biaya pemeliharaan.¹¹

Boleh tidaknya transaksi gadai menurut Islam, diatur dalam al-Qur'an dalam Surat al- Baqarah ayat (2) 283:



¹⁰ Ibnu Qudamah, *op.cit.*

¹¹ Agha Sofia, *Solusi Pegadaian Apa Dan Bagaimana*, (Bandung : CV. Multi Trust Creatif Service, 2008), Cet. ke-1, h. 68.



Artinya : “ Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang[180] (oleh yang berpiutang).Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

[180] barang tanggungan (borg) itu diadakan bila satu sama lain tidak percaya mempercayai” .¹²

Perum pegadaian memberikan batasan beberapa jenis barang yang dapat digadaikan. Perusahaan tersebut hanya menerima jenis barang yang dinilai sebagai barang bergerak saja. Barang-barang yang dapat digadaikan adalah emas, kendaraan, barang elektronik, barang rumah tangga dan barang lain yang dinilai berharga oleh Perum Pegadaian.¹³

Dari penjelasan diatas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut penelitian ini berjudul “ **Konsep Pemanfaatan Barang Gadai Menurut Ibnu**

¹² Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung : CV Penerbit J-ART, 2004), h.50.

¹³ Ade Arthesa, Endia Handiman, *Bank & Lembaga Keuangan Bukan Bank*, (Jakarta: PT. Indek, 2006), Cet. ke-1, h. 287.

Qudamah dan Relevansinya Terhadap Bisnis Pegadaian Syariah Kontemporer”.

B. Batasan Masalah

Untuk lebih terarahnya dalam penulisan ini maka penulis dapat mengambil batasan masalah yang diteliti. Adapun penelitian ini difokuskan kepada bagaimana Konsep Pemanfaatan Barang Gadai menurut Ibnu Qudamah dan Relevansinya terhadap bisnis pegadaian syariah kontemporer.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang telah ditetapkan, maka permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Bagaimana konsep pemanfaatan barang gadai menurut Ibnu Qudamah?
- 2) Bagaimana relevansi pandangan Ibnu Qudamah tentang konsep pemanfaatan barang gadai dengan bisnis pegadaian syariah kontemporer?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Untuk mengetahui konsep pemanfaatan barang gadai menurut Ibnu Qudamah

- b) Untuk mengetahui Relevansi pandangan Ibnu Qudamah tentang pemanfaatan barang gadai dengan bisnis pegadaian syariah kontemporer

2. Kegunaan Penelitian

- a) Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
- b) Sebagai suatu sumbangan pemikiran buat almamater dimana penulis menuntut ilmu
- c) Penelitian ini diharapkan dapat memberi suatu kontribusi bagi masyarakat tentang hal yang berkaitan dengan gadai

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Sesuai dengan judul diatas, penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan jalan membaca, menelaah dan meneliti buku-buku yang berkaitan dengan objek pembahasan, baik sumber primer maupun sekunder.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini di bagi dalam dua bagian, yaitu primer dan sekunder. Adapun sebagai data primer diambil dari kitab *al-Mughni* (Kitab Induk), sedangkan yang menjadi data sekunder dalam

penelitian ini diambil dari buku-buku yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas.

3. Metode Pengumpulan Data

Penulis mengumpulkan data-data dari berbagai literatur lalu ditelaah dan dikelompokkan kedalam kategori atas dasar persamaan dan perbedaan dari jenis data tersebut dihubungkan dengan yang lainnya sehingga akhirnya diperoleh gambaran yang utuh terhadap masalah yang diteliti.

4. Metode Analisis Data

Dalam menganalisa data yang disajikan, penulis menggunakan metode:

Analisa data kualitatif yaitu dengan mengumpulkan data yang telah ada kemudian data tersebut dikelompokkan kedalam kategori-kategori berdasarkan persamaan dan perbedaan dari jenis data tersebut, dengan tujuan dapat menggambarkan persamaan yang diteliti, kemudian dianalisa dengan menggunakan pendapat atau teori para ahli yang relevan.

5. Metode Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan teknik:

- a) Deduktif, yaitu menggambarkan data-data umum yang ada kaitannya dengan tulisan ini kemudian dianalisa dan diambil suatu kesimpulan khusus.
- b) Induktif, yaitu dengan mengumpulkan data-data yang khusus, kemudian dianalisa dan ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

- c) Komperatif, yaitu penelitian komperasi yang dapat menemukan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan kemudian membandingkan terhadap suatu masalah.

F. Sistematika Penulisan

Untuk lebih jelas dan mudah dipahami dalam penelitian ini, penulis memaparkan sistematikanya sebagai berikut:

Bab I : Merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, permasalahan, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Biografi Ibnu Qudhamah yang meliputi riwayat hidup, pendidikan dan karya-karya.

Bab III : Merupakan tinjauan umum tentang gadai yang terdiri dari, Rukun dan syarat sahnya perjanjian gadai, pemanfaatan dan penjualan barang gadai, Berakhirnya akad gadai, Kegiatan pelelangan.

Bab IV : Dalam bab ini menjelaskan pemikiran Ibnu Qudamah tentang konsep pemanfaatan barang gadai dan relevansinya terhadap bisnis pegadaian syariah kontemporer.

Bab V : Penutup terdiri dari kesimpulan dan saran

BAB II

BIOGRAFI IBNU QUDAMAH

A. Riwayat Hidup Ibnu Qudamah

Beliau adalah seorang imam, ahli fiqih dan zuhud, Asy Syaikh *Muwaffaquddin Abu Muhammad Abdullah Bin Ahmad Bin Muhammad Ibnu Qudamah al-Hanbali al-maqdisi*. Beliau berhijrah ke lereng bukit Ash-Shaliya, Damaskus, dan dibubuhkanlah namanya ad-Damsyiqi ash-Shalihi, nisbah kepada kedua daerah itu. Dilahirkan pada bulan Sya'ban 541 H di desa Jamma'il, salah satu daerah bawahan Nabulsi, dekat Baitil Maqdis, Tanah Suci di Palestina. Saat itu tentara salib menguasai Baitil Maqdis dan daerah sekitarnya.

Dia adalah imam dalam berbagai bidang ilmu tidak seorang pun pada zamannya setelah saudaranya yang lebih zuhud dan wara daripada beliau. Beliau pemalu tidak tergiur dengan gemerlap dunia serta isinya, lemah lembut tutur katanya, rendah hati mencintai orang-orang miskin, baik akhlaknya, pemurah dan ringan tangan, siapa yang melihatnya seakan-akan melihat sahabat Rasulullah seolah-olah tampak cahaya dari wajahnya, banyak ibadahnya¹.

Karenanya ayahnya Abul Abbas Ahmad Bin Muhammad Ibnu Qudamah, tulang punggung keluarga dari pohon nasab yang baik ini hajrah bersama keluarganya ke Damaskus dengan kedua anaknya, Abu Umar dan

¹ Ibnu Qudamah, *al-Mughni Syar al- Kabir*, (Beirut : Darul Fikri) Cet ke-1. h. 10.

Muwaffaquddin, juga saudara sepupu mereka, Abdul Ghani al-Maqdisi, sekitar tahun 551 H (al-Hafidz Dhiya'uddin mempunyai sebuah kitab tentang sebab hijrahnya penduduk *Baitul Maqdis* ke *Damaskus*. Di *Damaskus* mereka singgah di Masjid Abu Salih, di luar gerbang timur. Setelah dua tahun di sana, mereka pindah ke kaki gunung Qaisun di Shalihia, *Damaskus*. Dia mengadakan sejumlah majlis keilmuan di Masjid *al-Muzhaffari* yang berada di *Damaskus* dengan tujuan untuk menyebar luaskan Madzhab Hanbali dan menjadi Imam Shalat bagi kaum muslim, para ulama pun sering datang kepadanya untuk berdialog dan mendengarkan perkataannya. Hampir dapat dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang melihatnya kecuali dia akan mencintainya.²

Hal itu disebabkan karena ketinggian ilmunya, sikap *wara'*nya, dan juga ketakwaannya. *Muwaffaquddin* tidak pernah merasa jemu dengan untuk berdialog dengan mereka dalam waktu yang lama serta untuk menerima banyak pertanyaan, baik dari kalangan awam maupun kalangan tertentu. Setelah itu *muwaffaquddin* kembali ke bagdad, dari bagdad dia pergi ke *Baitullah al Haram* bersama rombongan dari Irak dengan tujuan untuk berhaji dan berguru kepada sebagian ulama *Makkah*. Dari sana, dia pun kembali lagi ke *Bagdad*.³

Di masa-masa itu *Muwaffaquddin* menghafal al Quran dan menimba ilmu-ilmu dasar kepada ayahnya, Abul'Abbas, seorang ulama yang memiliki

² Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, (Jakarta : Pustaka Azam, 2007), Cet ke-1, h.4.

³ *Ibid.* h. 5.

kedudukan mulia serta seorang yang *zuhud*. Kemudian ia berguru kepada para ulama Damaskus lainnya. Ia hafal *Mukhtasar al Khiraqi* (fiqh madzab Imam Ahmad Bin Hambal) dan kitab-kitab lainnya. Ia memiliki kemajuan pesat dalam mengkaji ilmu. Menginjak umur 20 tahun, ia pergi ke Baghdad ditemani saudara sepupunya, Abdul Ghani al-Maqdisi (anak saudara laki-laki ibunya) dan keduanya umurnya sama. *Muwaffaquddin* semula menetap sebentar di kediaman Syekh Abdul Qadir al-Jailani, di Baghdad. Saat itu Shaikh berumur 90 tahun. Ia mengaji kepada beliau *Mukhtasar al-Khiraqi* dengan penuh ketelitian dan pemahaman yang dalam, karena ia telah hafal kitab itu sejak di Damaskus.

Kemudian wafatlah Syaikh Abdul Qadir al-Jailani rahimahullah, selanjutnya ia tidak pisah dengan Syaikh Nashih al-Islam Abul Fath Ibn Manni untuk mengaji kepada beliau madzab Ahmad dan perbandingan madzab. Ia menetap di Baghdad selama 4 tahun. Di kota itu juga ia mengaji hadis dengan sanadnya secara langsung mendengar dari Imam Hibatullah Ibn aad-Daqqaq dan lainnya. Setelah itu ia pulang ke Damaskus dan menetap sebentar di keluarganya. Lalu kembali ke Baghdad tahun 576 H.

Di Baghdad dalam kunjungannya yang kedua, ia lanjutkan mengaji hadis selama satu tahun, mendengar langsung dengan sanadnya dari Abdul Fath Ibn al-Manni. Setelah itu ia kembali ke Damaskus. Pada tahun 574 H ia menunaikan ibadah haji se usai ia pulang ke Damaskus. Di sana ia mulai menyusun kitabnya *al-Mughni Syarh Mukhtasara al-Khiraqi* (fiqh madzab Imam Ahmad Bin Hambal). Kitab ini tergolong kitab kajian terbesar dalam

masalah fiqih secara umum, dan khususnya di madzab Imam Ahmad Bin Hanbal. Sampai-sampai Imam ‘Izzudin Ibn Abdus Salam as-Syafi’i, yang digelar Sulthanul ‘Ulama mengatakan tentang kitab ini: “Saya merasa kurang puas dalam berfatwa sebelum saya menyanding kitab *al-Mughni*”. Banyak para santri yang menimba ilmu hadis kepada beliau, fiqih, dan ilmu-ilmu lainnya.

Dan banyak pula yang menjadi ulama fiqih setelah mengaji kepada beliau. Diantaranya, keponakannya sendiri, seorang qadhi terkemuka, Syaikh Syamsuddin Abdur Rahman Bin Abu Umar dan ulama-ulama lainnya seangkatannya. Di samping itu beliau masih terus menulis karya-karya ilmiah di berbagai disiplin ilmu, lebih-lebih di bidang fiqih yang dikuasainya dengan matang. Beliau banyak menulis kitab di bidang fiqih ini, yang kitab-kitab karyanya membuktikan kamapanannya yang sempurna di bidang itu. Sampai-sampai ia menjadi buah bibir orang banyak dari segala penjuru yang membicarakan keutamaan keilmuan dan munaqib (sisi-sisi keagungannya).

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata: “Setelah al-Auza’i, tidak ada orang yang masuk ke negri Syam yang lebih mapan di bidang fiqih melebihi *al-Muwaffaq*”. Ibnu ash-Shalah berkata: “Saya tidak pernah melihat orang alim seperti *al-Muwaffaq*”. Cucu Ibn al-Jauzi berkata: “Orang yang melihat *al-Muwaffaq* seakan-akan ia melihat salah seorang sahabat nabi. Seakan-akan cahaya memancar dari wajahnya.” Imam *al-Muwaffaqiq* adalah seorang imam di berbagai disiplin ilmu syar’i. Di zaman beliau, setelah saudaranya (abu

Umar), tiada orang yang lebih *zuhud*, lebih *wara'* dan lebih mapan ilmunya melebihi beliau.⁴

Beliau mengikuti jejak as-Salaf dalam masalah aqidah, *kezuhudan*, dan kewara'an. Beliau sangat pemalu, sangat menjauh dari gemerlapnya dunia dan dari pengejanya. Beliau sosok yang pemaaf, tidak kaku dan sangat rendah hati, cinta kepada orang yang kesusahan, mulia akhlaknya, banyak berkorban untuk orang lain, tekun beribadah, kaya keutamaan, berotak cerdas, sangat jeli dalam ilmunya, sangat tenang, sedikit bicara, dan banyak kerja. Orang merasa tentram dan damai dengan sekedar memandang wajahnya walau sebelum beliau berbicara.

Kebaikan dan kemuliaan sifat beliau tidak terhitung, al-Hafidzh Dhiya'uddin al-Maqdisi, demikian juga al-Hafidzh adz-Dzahabi, menulis sebuah kitab tentang biografi Imam Ibnu Qudamah ini. Kemasyhuran Imam Ibnu Qudamah tidak terbatas pada masalah keilmuan dan ketaqwaan, akan tetapi beliau juga seorang mujahid yang terjun di medan jihad fisabilillah bersama pahlawan besar Shalahuddin al-Ayyubi yang berhasil menyatukan kekuatan militer umat Islam pada tahun 583 H untuk menumpas tentara salib dan membersihkan tanah suci Quds dari najis mereka.

Para penulis biografi Imam Ibnu Qudamah menyebutkan bahwa beliau dan saudara kandungnya, Abu Umar, beserta murid-murid beliau dan beberapa orang keluarganya turut berjihad di bawah panji-panji para mujahidin

⁴ Ibnu Qudamah, *al-Mugni Syar al-Kabir op. cit.*, h. 10.

yang dimenangkan oleh Allah ini. Beliau berdua dan murid-muridnya mempunyai satu kemah yang senantiasa berpindah-pindah kemanapun para mujahidin berpindah dan mengambil posisi. Imam Ibnu Qudamah wafat pada hari Sabtu, tepat di hari Idul Fithri tahun 629 H. Beliau dimakamkan di kaki gunung Qasiun di Shalihiya, di sebuah lereng di atas Jami' al-Hanabilah (masjid besar para pengikut madzab).

Muwaffaquddin menikah dengan Maryam, putri Abu Bakar bin Abdillah bin Sa'ad al Maqdisi, paman *Muwaffaquddin*. Dari pernikahannya itu, dia dikaruniai 5 orang anak: 3 laki-laki yaitu Abu al Fadhl Muhammad, Abu al'Izzi Yahya, dan Abu al Majid Isa, serta 2 anak perempuan yaitu Fatimah dan Syafiyah. *Muwaffaquddin* adalah seorang yang berparas tampan, diwajahnya terdapat cahaya seperti cahaya matahari yang muncul karena sikap *wara'*, ketakwaan, dan *zuhudnya*, memiliki jenggot yang panjang, cerdas, bersikap baik, dan merupakan seorang penyair besar.⁵

Guru-guru Muwaffaquddin

Dari penjelasan di atas, kita telah mengetahui bahwa *Muwaffaquddin* telah mendalami berbagai macam ilmu yang tidak diperolehnya dari segelintir guru. Akan tetapi, guru-guru *Muwaffaquddin* itu berjumlah lebih dari 30 orang. Mereka ada yang tinggal di Baqhdad, Damaskus, Mousul, dan Makkah. Disini penulis akan menyebutkan sebagian dari mereka, yaitu:

⁵ Ibnu Qudamah, *al-Mugni, op. cit., h. 5.*

Pertama, di Baghdad:

1. Abu Zur'ah Thahir bin Muhammad bin Qudamah al Maqdisi Muwaffaq menimba ilmu darinya di Baghdad pada tahun 566 H.
2. Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad atau yang terkenal dengan nama Ibnu al Khasysyab, seorang ahli Nahwu pada masanya, serta seorang ahli hadits dan ahli fikih. Pada masanya, dia merupakan seorang Imam dalam bidang Ilmu Nahwu, *Lughah* (bahasa), dan ahli fatwa. Para ulama pada masanya sering berkumpul ditempatnya dengan tujuan untuk meminta fatwa dan bertanya kepadanya tentang berbagai permasalahan. Dia wafat pada tahun 567 H.
3. Jamaluddin Abu al Farj Abdurrahman bin Ali bin Muhammad atau yang terkenal dengan nama Ibnu al Jauzi, seorang penulis berbagai kitab terkenal. Dia adalah orang yang telah menyusun sejumlah kitab dalam berbagai bidang keilmuan, dimana dia telah melakukan dengan baik penyusunan kitab-kitab itu. Dia adalah seorang ahli fikih, ahli hadist, serta orang yang *wara'* dan *zuhud*. Dia wafat pada tahun 597 H.
4. Abu Hasan Ali bin Abdurrahman bin Muhammad ath-Thusi al Baghdadi atau Ibnu Taaj, seorang *qari'* dan ahli *zuhud*.
5. Abu al Fath Nashr bin Fityan bin Mathar atau yang terkenal dengan nama Ibnu al Mina An- Nahrawani, seorang pemberi nasehat tentang agama Islam. Muwaffaquddin telah belajar tentang fikih dan ushul fikih darinya. Dia meninggal dunia pada tahun 583 H dalam keadaan belum menikah.
6. Muhammad bin Muhammad as-Sakan

Kedua, di Damaskus:

7. Ayahnya sendiri yaitu Ahmad bin Muhammad bin Qudamah al Maqdisi.
8. Abu al- Makarim Abdul bin Muhammad bin Muslim bin Hilal al AzdiAddimsyaqi (wafat tahun 565 H).
9. Abu al Fadhl Abdullah bin Ahmad bin Muhammad ath- Thusi (wafat tahun 578 H).

Ketiga, di Makkah:

1. Abu Muhammad al Mubarah bin Ali al Hanbali, seorang Imam dalam mazhab Hanbali yang tinggal di mekah, serta seorang ahli hadist dan ahli fikih.⁶

Murid-muridnya

Dari pembahasan yang lalu, kita telah mengetahui bahwa *Muwaffaquddin* telah mengadakan sejumlah majlis pengkajian di Masjid al Muzhaffari dengan tujuan untuk menyebarluaskan Mazhab Hanbali. Hampir dapat dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang mendengar perkataannya kecuali dia akan mencintainya, lalu dia akan mendengarkan dan mendalami berbagai ilmu darinya. Dari sini, maka muncullah banyak orang yang memiliki andil dalam dalam menyebarluaskan Mazhab Hanbali, diantara mereka adalah:

1. Saifuddin Abu abbas ahmad bin isa abdullah bin Qudamah al Maqdisi ash-Shalihi al Hanbali (wafat tahun 643 H).

⁶ *Ibid.* h. 7.

2. Taqiyuddin Abu Ishaq Ibrahim bin Muhammad al Azhar ash-Sharifaini al Hanbali, seorang hafiz (wafat tahun 641 H).
3. Taqiyuddin Abu Abas Ahmad bin Muhammad bin Abdul Ghani al Maqdisi (wafat tahun 643 H).
4. Zakiyuddin Abu Muhammad Azhim bin Abdul Qawiy bin Abdulllah al Mundziri, seorang pengikut Mazhab Syafi'i (wafat tahun 656 H).
5. Abu Muhammad Abdul Muhsin bin Abdul Karim bin Zhafir al Hashani, seorang ahli fikih yang tinggal di Mesir (wafat tahun 625 H).
6. Syamsuddin Abu Muhammad Abdurrahman bin Muhammad bin Ahmad bin Qudamah al Maqdisi al Jumma,li (wafat tahun 682 H). Dia adalah putra dari saudara laki-laki *Muwaffaquddin*. Dia telah berguru kepada *Muwaffaquddin* dan telah menghafal kitab *al Muqni'* darinya. Lalu dia memaparkan hafalannya kepada pamannya itu hingga sang paman pun memberinya ijazah (izin) untuk meriwayatkan kitab tersebut. Dia memberikan *Syarh* (penjelasan) yang baik terhadap kitab tersebut, dimana syarh-nya itu diberi nama dengan *asy-Syarh al Kabir*.⁷ Kitab *asy-Syarh al Kabir* ini merupakan kitab yang bagus, meskipun didalamnya Syamsuddin tidak menambahkan sesuatu yang dapat diperhitungkan kecuali hanya sedikit sekali. Dalam *Syarh*-nya itu, dia banyak terpengaruh oleh kitab pamannya, *Muwaffaquddin*, yaitu kitab *al- Mughni*. Kitab *asy-Syarh al- Kabir* ini dicetak bersama-sama dengan kitab *al- Mughni*.

⁷ Ibid. h. 7.

Karya-karyanya

Muwaffaquddin memiliki sejumlah karya dalam berbagai bidang keilmuan.

Disini, kami akan menyebutkan sebagiannya di antaranya, yaitu:

1. *Al Mughni Syarh Mukhtashar al Khiraqi*, yaitu kitab yang sedang berada di tangan kita ini. Sebentar lagi, kita akan kembali membicarakan tentang kitab ini dengan sedikit terperinci.
2. *Al- Mughni* diatas kita telah menyinggung tentang kitab ini. Kitab ini telah dijelaskan oleh putra dari saudara laki-laki Muwaffaquddin, seperti yang telah kita ketahui.
3. *Al Kafi fi al Fiqh*
4. *Al Kafi*, sebuah kitab yang telah dicetak dalam 4 juz dan telah ditahqiq oleh Zuhair asy- syawiay.
5. *Al Istibshar fi Nasb al Anshar*
6. *Al Burhan fi Masa'il al Quran*
7. *Raudah an-Nazhir wa Junah al Munazhir*, sebuah kitab tentang ushul fikih yang telah dicetak dimesir.
8. *Dzammu Ma Alaihi Muda'u at-Tasawwuf*.
9. *Risalah fi Dzamm at-Ta'wil*.
10. *Risalah fi Dzamm al Muwaswisin*.
11. *Risalah fi Lam'ah al I'tiqad*.⁸

⁸ *Ibid.* h .9

Kitab *al-Mughni* dianggap sebagai salah satu kitab yang membahas tentang Fikih Islam secara umum dan Fikih Madzhab Hanbali secara Khusus. Sebab, penulis kitab tersebut telah menyusunnya dalam bentuk *Fiqhul Muqarin* (perbandingan antar madzhab). Ibnu Qudamah tidak hanya menjelaskan ungkapan-ungkapan yang terdapat dalam kitab *Mukhtashar* dan menerangkan maksud-maksud yang terkandung di dalamnya saja, tetapi juga menganalisa semua poin yang berkaitan suatu masalah yang disebut didalamnya. Dia menyebutkan perbedaan riwayat yang berkembang di kalangan pengikut Madzhab Hanbali mengenai masalah tersebut, lalu dia juga memaparkan perbedaan riwayat yang terjadi di antara sejumlah imam yang berasal dari berbagai madzhab.

Bahkan, dia juga menyebutkan madzhab sejumlah ulama yang sudah tidak berkembang lagi karena tidak adanya para pengikut yang berusaha untuk menyebarkanluaskannya, seperti madzhab Hasan al Bashari. Atha, Sufyan ats-Tsauri dan lain sebagainya. Sebagaimana Ibnu Qudamah juga menyebutkan dalil-dalil yang digunakan oleh orang yang mengungkapkan suatu pendapat dalam masalah yang disebutkan. Lalu dia menjelaskan dalil-dalil tersebut dilihat dari sisi kekuatan dan kelemahannya.

Tanpa diragukan lagi, kitab *al Mughni* ini merupakan kajian fikih terbaik yang telah disusun dalam format Fikih Perbandingan, dimana tidak ada satu ahli fikih pun dari madzhab-madzhab lain yang menyusun sebuah kitab dengan menggunakan metodologi seperti ini. Meskipun ada orang yang

berusaha untuk melakukan hal seperti itu, akan tetapi kajiannya hanya bersifat sederhana saja. Hal ini dapat dijumpai dalam kitab *Bidayatul al Mujtahid* karya Ibnu Rusyd dan *al Qawanin al Fiqhiyyah* karya Ibnu Jaza al Kilabi. Kedua kitab tersebut disajikan dalam bentuk yang sederhana dan ringkas. Sedangkan *al-Mughni* dianggap sebagai sebuah ensiklopedi fikih yang telah dipersembahkan oleh Ibnu Qudamah kepada orang-orang yang berkecimbung dalam Fikih Perbandingan.⁹

⁹ *Ibid.* h. 10

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG GADAI

A. Pengertian Gadai

Syari'at Islam memerintahkan umatnya supaya tolong-menolong yang kaya harus menolong yang miskin, yang mampu harus menolong yang tidak mampu. Bentuk tolong menolong ini bisa berbentuk pemberian dan bisa berbentuk pinjaman.

Dalam bentuk pinjaman hukum Islam menjaga kepentingan kreditur, jangan sampai ia dirugikan. Oleh sebab itu, ia dibolehkan meminta barang dari debitur sebagai jaminan utangnya. Sehingga apabila debitur itu tidak mampu melunasi pinjamannya, barang jaminan dapat dijual oleh kreditur. Konsep tersebut dalam fiqh Islam dikenal dengan istilah rahn.¹

Gadai menurut bahasa berarti menggadaikan, merungguhkan-رهن-يرهن atau jaminan (borg).² Sementara menurut istilah adalah suatu barang yang dijadikan peneguhan/penguat kepercayaan dalam utang piutang. Barang

¹ Chuzaimah T. Yango, Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta : Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan (LSIK), 2004), Cet. ke-3, h. 78.

² Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab Indonesia*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1990), Cet ke-1, h.148.

boleh dijual kalau utang tidak dapat dibayar, hanya penjualan ini hendaklah dengan keadilan (dengan harga yang berlaku di waktu itu).³

Definisi *ar-rahnu* secara syara' adalah menjaminkan utang dengan sesuatu yang bisa menjadi pembayar utang tersebut, atau nilainya bisa membayar utang tersebut. Artinya, menjadikan sesuatu yang bernilai uang sebagai jaminan terhadap utang.

Ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama fikih, ulama mazhab Maliki mendefinisikan rahn sebagai harta yang oleh pemiliknya dijadikan jaminan utang yang bersifat mengikat.

Ulama Mazhab Hanafi mendefinisikan rahn dengan menjadikan sesuatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak (piutang) tersebut, baik seluruhnya maupun sebagian. Sedangkan Ulama Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali mendefinisikan rahn dalam arti akad, yaitu menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berhutang tidak bisa membayar utangnya itu.⁴

Dari definisi yang dikemukakan oleh ulama-ulama fiqh tadi ada persamaannya adalah menukarkan sesuatu benda dengan uang, tetapi ada

³ Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1994), Cet ke-1, h. 43.

⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam*, (Jakarta : Yayasan Adikarya IKAPI, 2007), Cet. ke-3, h.76.

perbedaannya bagi umat Islam, uang tersebut adalah pinjaman dan barang yang diterima adalah sebagai tanggungan.

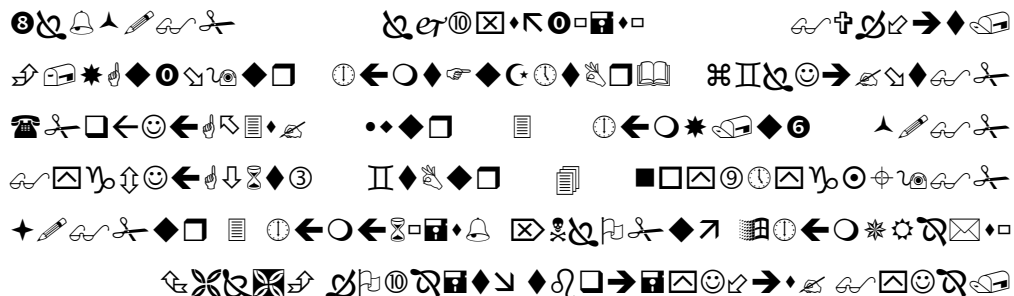
Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang berpiutang atas suatu barang yang bergerak, yang diserahkan padanya oleh seseorang atau oleh orang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada orang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya; dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan.⁵

Pengertian gadai menurut syariat Islam berbeda dengan pengertian gadai menurut ketentuan hukum adat yang mana dalam ketentuan hukum adat pengertian gadai yaitu menyerahkan tanah untuk menerima pembayaran sejumlah uang secara tunai, dengan ketentuan si penjual (pengadaian) tetap berhak atas pengembalian tanahnya dengan jalan menebusnya kembali.

Kemudian untuk menyakinkan kita tentang persoalan gadai ini, dikemukakan ayat dan hadis yang berkaitan dengannya, diantaranya surat al-Baqarah ayat 283 dan hadis dari Anas, yaitu



⁵ Frianto Fandia, Elly Santi Ompusunggu, Acmad Abror, *Lembaga Keuangan*, (Jakarta : PT.



Artinya : “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang[180] (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. barang tanggungan (borg) itu diadakan bila satu sama lain tidak percaya mempercayai”.⁶

عن انس قال رهن رسول الله ص م د ر عا عند يهودي بالمدينة و اخذ منه شعير

الاهله

Artinya: “ Dari Anas berkata ia: Rasullulah telah merungguhkan baju besi beliau kepada seorang Yahudi di Madinah, sewaktu menghutang syair (gandum) dari orang Yahudi itu untuk keluarga beliau. (HR.Ahmad, Bukhari, Nasai dan Ibnu Majah)”.⁷

⁶ Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahan*, (Bandung: CV J-ART, 2004), Cet ke-1. h.50.

⁷ Nazar Bakry, *op. cit.*, h. 44.

Dalam Ensiklopedia Indonesia, disebutkan bahwa gadai atau hak gadai adalah hak atas benda terhadap benda bergerak milik si berhutang yang diserahkan ke tangan si piutang sebagai jaminan pelunasan hutang si berhutang tadi (Pasal 1150-1160 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Jaminan dengan benda tak bergerak disebut hepotek (hak benda terhadap sesuatu benda tak bergerak yang memberi hak prefensi kepada seseorang yang berpiutang/pemegang hepotek untuk memungut piutangnya dari hasil penjualan tersebut).

Gadai diadakan dengan persetujuan dan hak itu hilang jika gadai itu lepas dari kekuasaan piutang. Si pemegang gadai berhak menguasai benda yang digadaikan kepadanya selama hutang si berhutang belum lunas, tetapi ia tak berhak mempergunakan benda itu. Selanjutnya ia berhak menjual gadai itu, jika si berhutang tak mau membayar hutangnya. Jika hasil gadai itu lebih besar daripada hutang yang harus dibayar, maka kelebihan itu harus dikembalikan kepada si pegadai.⁸

B. Rukun Gadai

Dalam menjalankan pegadaian syariah, pegadaian harus memenuhi rukun gadai syariah. Rukun gadai tersebut antara lain:

⁸ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004), Edisi 1, Cet. ke-2, h. 254.

- 1) *Ar-Rahin* (yang menggadaikan). Orang yang telah dewasa, berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang yang akan digadaikan.
- 2) *Al-Murtahin* (yang menerima gadai). Orang, bank atau lembaga yang dipercaya *rahin* untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang (gadai).
- 3) *Al- Marhun/ Rahn* (barang yang digadaikan). Barang yang digunakan *rahin* untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan hutang.
- 4) *Al- Marhun Bih* (hutang). Sejumlah dana yang diberikan *murtahin* kepada *rahin* atas dasar besarnya tafsiran *marhun*.
- 5) *Sighat, Ijab* dan *Qabul*. Kesepakatan antara *rahin* dan *murtahin* dalam melakukan transaksi gadai.

C. Syarat Gadai

1) *Rahin* dan *Murtahin*

Pihak-pihak yang melakukan perjanjian *rahn*, yaitu *rahn* dan *murtahin* harus mengikuti syarat-syarat berikut kemampuan, yakni berakal sehat. Kemampuan juga berarti kelayakan seseorang untuk melakukan transaksi pemilikan.

2) Syarat Gadai

- a. *Sighat* tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan juga dengan suatu waktu di masa depan.
- b. *Rahn* mempunyai sisi pelepasan barang dan pemberian hutang seperti halnya akad jual beli. Maka tidak boleh diikat dengan syarat tertentu atau dengan suatu waktu di masa depan.

3) *Marhun Bih* (hutang)

- a. Harus merupakan hak yang wajib diberikan atau diserahkan kepada pemiliknya.
- b. Memungkinkan pemanfaatan. Bila sesuatu menjadi hutang tidak bisa dimanfaatkan, maka tidak sah.
- c. Harus dikuantifikasi atau dapat dihitung jumlahnya. Bila tidak dapat diukur atau kuantifikasi rahn itu tidak sah.

4) *Marhun* (barang)

Aturan pokok dalam mazhab Maliki tentang masalah ini ialah bahwa gadai itu dapat dilakukan pada semua macam harga pada semua macam jual beli, pada jual beli mata uang (*sharf*) dan pokok modal pada salam yang berkaitan dengan tanggungan. Demikian itu karena pada *sharf* diisyaratkan tunai yakni kedua belah pihak saling menerima. Oleh karena itu, tidak boleh terjadi akad gadai padanya. Begitu pula pada harta modal salam, meskipun menurut pendapatnya agak kurang penting dalam masalah ini.⁹

Menurut Imam Syafi'i, syarat-syarat gadai terbagi menjadi dua bagian:

Pertama, syarat yang menjadi keharusan, yaitu penyerahan barang yang digadaikan. Dengan demikian, jika seseorang menggadaikan sebuah rumah, lalu dia tidak menyerahkannya, maka akad tersebut batal karenanya.

⁹ Mawardi, *Lembaga Perekonomian Umat*, (Pekanbaru : Suska Press, 2008), Cet ke-1, h. 84.

Dan jika barang yang digadaikan itu sudah berada di tangan orang yang memberikan pinjaman sebelum akad dilaksanakan, baik karena disewa, dipinjam, *ghasab*, atau yang lainnya, berarti barang tersebut telah berada ditangannya setelah dilaksanakan akad. Dengan demikian, syarat sahnya penarikan barang gadai adalah penggadai itu sendiri.

Kedua, syarat-syarat yang berkaitan dengan sahnya gadai, yaitu terdiri dari beberapa macam:

- a. Yang berkaitan dengan akad, yaitu tidak tergantung pada suatu syarat yang tidak diperlukan dalam akad ketika menyelesaikan hutang piutang, karena hal itu dapat membatalkan gadai.
- b. Yang berkaitan dengan kedua belah pihak yang melaksanakan akad, yaitu yang menyerahkan dan yang menerima gadai. Syarat bagi keduanya adalah baligh dan berakal. Dengan demikian, suatu akad tidak boleh dilakukan oleh orang gila, anak-anak atau orang idiot.¹⁰

Ulama fikih mengemukakan syarat-syarat bagi sahnya rahn menyangkut beberapa hal, yaitu menyangkut syarat-syarat para pihak yang terkait dengan akad rahn, menyangkut syarat-syarat dari akad itu sendiri, menyangkut syarat-syarat utang, dan menyangkut syarat-syarat agunan. Syarat-syarat tersebut sebagaimana dijelaskan di bawah ini.

¹⁰ Syaikh Kamil Muhammad' Uwaidah, *Fiqih Wanita*, (Jakarta : Pustaka Al-Kausar, 2007), Cet ke-1, h. 621.

Syarat yang terkait dengan orang yang membuat akad *rahn* adalah bahwa orang itu harus cakap bertindak hukum, menurut jumhur ulama adalah orang yang telah balig dan berakal. Sedangkan menurut ulama madzhab hanafi, kedua belah pihak yang berakad tidak diisyaratkan balig, tetapi cukup berakal saja. Oleh sebab itu, menurut mereka, anak kecil yang *mumayiz* boleh melakukan akad *rahn* yang dilakukan anak kecil yang *mumayiz* ini mendapat persetujuan dari walinya.

Ulama Madzhab Hanafi mengatakan dalam akad *rahn* tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, karena akad *rahn* sama dengan akad jual beli. Apabila akad tersebut dibarengi dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, maka syarat itu menjadi batal, namun akad tetap sah. Misalnya, debitur mensyaratkan apabila tenggang waktu utang telah habis dan utang belum terbayar, maka *rahn* itu diperpanjang satu bulan atau kreditur mensyaratkan barang agunan itu dapat dimanfaatkan. Ulama Madzhab Maliki, Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanbali mengatakan bahwa apabila syarat itu adalah syarat yang mendukung kelancaran akad tersebut, maka syarat tersebut diperbolehkan, tetapi apabila syarat itu bertentangan dengan tabiat akad *rahn*, maka syarat yang demikian itu batal. Kedua syarat dalam contoh di atas (perpanjangan *rahn* satu bulan dan agunan boleh dimanfaatkan), termasuk syarat yang tidak sesuai dengan tabiat *rahn*, sehingga syarat tersebut dinyatakan batal. Syarat yang diperbolehkan adalah, misalnya untuk sahnya *rahn* tersebut pihak kreditur meminta agar dalam

pembuatan akad itu hendaknya disaksikan oleh dua orang saksi. Sedangkan syarat yang batal, misalnya apabila diisyaratkan bahwa agunan tersebut tidak boleh dijual ketika rahn tersebut jatuh tempo, padahal debitur tidak mampu membayar utangnya.¹¹

D. Akad Perjanjian Gadai

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa pegadaian dapat dinyatakan sah apabila memenuhi tiga persyaratan, yaitu:

- a. Harus berupa barang, karena hutang tidak bisa digadaikan.
- b. Penetapan kepemilikan pegadaian atas barang yang digadaikan tidak terhalang seperti *mushaf*.
- c. Barang yang digadaikan bisa dijual manakala sudah masa pelunasan hutang gadai

Berdasarkan tiga syarat di atas, maka dapat diambil alternatif dalam mekanisme perjanjian gadai, yaitu dengan menggunakan tiga akad perjanjian. Ketiga akad perjanjian tersebut:

- a. *Akad Qard al-Hasan*. Akad ini dilakukan untuk nasabah yang menginginkan mengadaikan barang untuk keperluan konsumtif. Dengan demikian, nasabah (*rahin*) akan memberikan biaya upah atau *fee* kepada pegadaian (*murtahin*) telah menjaga atau merawat barang-barang gadaian (*marhun*).
- b. *Akad Mudharabah*. Akad ini dilakukan untuk nasabah yang menggadaikan jaminannya untuk menambah modal usaha. dengan demikian *rahin* akan

¹¹ Sutan Remy Sjahdeini, *op.cit.*, h.79.

memberikan bagi hasil kepada murtahin sesuai dengan kesepakatan, sampai modal yang pinjam terlunasi.

- c. *Akad bai' Muqayyadah*. Untuk sementara akad ini dapat dilakukan jika rahin yang menginginkan menggadaikan barangnya untuk keperluan produktif. Artinya dalam menggadaikan, *rahin* tersebut menginginkan modal kerja berupa pembelian barang. Sedangkan barang jaminan dapat dimanfaatkan. Dengan demikian murtahin akan membelikan barang yang sesuai dengan keinginan *rahin* atau *rahin* akan memberikan *mark up* kepada *murtahin* sesuai dengan kesepakatan pada saat akad berlangsung sampai batas waktu yang telah ditentukan.¹²

E. Pemanfaatan Dan Penjualan Barang Gadaian

1. Pemanfaatan rahin atas borg (barang yang digadaikan)

- a. Ulama Hanafiah berpendapat bahwa rahin tidak boleh memanfaatkan barang tanpa seizin murthahin, begitu pula murtahin tidak boleh memanfaatkannya tanpa seizin rahin. Pendapat ini senada dengan pendapat Ulama Hanabilah.
- b. Ulama malikiyah berpendapat bahwa jika borg sudah berada ditangan *murthahin*, *rahin* mempunyai hak memanfaatkan.
- c. Ulama Safiiyah berpendapat bahwa rahin dibolehkan untuk memanfaatkan barang jika tidak menyebabkan borg berkurang, tidak perlu meminta izin, seperti mengendarainya, menempatnya dan lain-

¹² *Ibid.* h. 86.

lain. Akan tetapi jika menyebabkan barang berkurang, seperti sawah, kebun, rahn harus meminta izin pada murtahin.

2. Pemamfaatan *murtahin* atas *borg*

- a. Ulama Hanafiah berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh memanfaatkan borg sebab dia hanya berhak menguasainya dan tidak boleh memanfaatkannya.
- b. Ulama Malikiyah membolehkan murtahin memanfaatkan *borg* jika diizinkan oleh rahin atau diisyaratkan ketika akad dan barang tersebut barang yang dapat diperjual belikan serta ditentukan waktunya secara jelas. Pendapat ini hampir senanda dengan pendapat ulama safiiyah.
- c. Pendapat ulama Hanabilah berbeda dengan jumhur. Mereka berpendapat, jika borg berupa hewan, murtahin boleh memanfaatkan seperti mengenderai atau mengambil susunya sekedar mengganti biaya meskipun tidak diizinkan oleh rahin. Adapun borg selain hewan tidak boleh memanfaatkan kecuali atas izin rahin.¹³

Dalam pengambilan manfaat barang-barang yang digadaikan, para ulama berbeda pendapat, diantaranya jumhur fuqaha dan Ahmad.

Jumhur fuqaha berpendapat bahwa murtahin tidak boleh mengambil suatu manfaat barang-barang gadaian tersebut, sekalipun *rahin*

¹³ Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta : Gaja Mada University Press, 2006), Cet ke-1, h. 94.

mengizinkannya, karena hal ini termasuk kepada utang yang dapat menarik manfaat, sehingga bila dimanfaatkan termasuk riba.¹⁴

F. Berakhirnya Akad Gadai (Rahn)

Menurut ketentuan syariat bahwa apabila masa yang telah diperjanjikan untuk pembayaran utang telah terlewati maka si berhutang berkewajiban untuk membayar hutangnya. Namun seandainya si berhutang tidak punya kemauan untuk mengembalikan pinjamannya hendaklah ia memberi izin kepada pemegang gadai untuk menjual barang gadaian. Dan seandainya izin ini tidak diberikan oleh si pemberi gadai maka si penerima gadai dapat meminta pertolongan hakim untuk memaksa si pemberi gadai untuk melunasi hutangnya atau memberikan izin kepada si penerima gadai untuk menjual barang gadaian tersebut.

Apabila batas waktu pegadaian berakhir dan utang harus dibayar, pemegang gadai dapat mengajukan permohonan kepada lembaga peradilan agar gadaian itu dijual dan utang akan dibayar dengan hasil penjualan barang tanggungan tersebut. Untuk menghindari kesulitan dan pembiayaan, maka pengurus pegadaian mempunyai wakil yang memiliki kekuasaan untuk bertindak dan dapat dipercayai untuk menjual barang gadaian.¹⁵

¹⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007), Cet ke-1, h. 108.

¹⁵ Muhammad Muslehuddin, *Sistem Perbankan Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004),Cet ke-1, h. 90.

Apabila pemegang gadai telah menjual barang gadaian tersebut dan ternyata ada kelebihan dari yang seharusnya dibayar oleh si pegadai, maka kelebihan tersebut harus diberikan kepada si pegadai. Sebaliknya sekalipun barang gadaian telah dijual dan ternyata belum dapat melunasi hutang si pegadai, maka si pegadai masih punya kewajiban untuk membayar kekurangannya.

Sayyid Sabiq mengatakan jika terdapat klausula *murthahin* berhak menjual barang gadai pada waktu jatuh tempo perjanjian gadai, maka ini dibolehkan. Argumentasi yang diajukan adalah bahwa menjadi haknya pemegang barang gadaian untuk menjual barang gadaian tersebut. Pendapat ini berbeda dengan pendapat Imam as Syafi'i yang memandang dicantumkannya klausula tersebut dalam perjanjian gadai adalah batal demi hukum.

Dahulu pada zaman tradisi Arab sebelum Islam datang, jika orang yang mengadaikan barang tidak mampu mengembalikan pinjaman, maka hak kepemilikan barang gadai beralih ke pemegang gadai. Pratek semacam inilah yang kemudian dibatalkan oleh Islam. Hal ini tertuang dalam hadist dari Muawiyah bin Abdullah bin Ja'far: bahwa seseorang mem-borg-kan sebuah rumah di Madinnah untuk jangka waktu tertentu. Kemudian nasabnya lewat. Lalu sipemegang barang borg (*murtahin*) menyatakan bahwa “ ini menjadi rumahku”. Rasulullah kemudian bersabda:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغلِق الرهن من صاحبه الذي رهنه له
غنمه و عليه غرمه

Artinya: “ Janganlah ia (pemegang barang gadaian) menutup hak gadaian dari pemiliknya (*rahin*) yang menggadaikan. Ia (*murtahin*) berhak memperoleh bagiannya dan dia (*rahin*) berkewajiban membayar gharamahnya (HR.asy-Syafi’i)”.¹⁶

Dapat disimpulkan bahwa akad gadai (*rahn*) berakhir dengan hal-hal sebagai berikut:

1. Barang telah diserahkan kembali kepada pemiliknya
2. *Rahin* membayar hutangnya
3. Dijual dengan perintah hakim atas perintah *rahin*
4. Pembebasan hutang dengan cara apapun, meskipun tidak ada persetujuan dari pihak *rahin*.¹⁷

Ibnu al- Mundzir mengatakan semua yang alim sependapat, bahwa siapa yang memborgkan sesuatu harta, kemudian dia melunasi sebagiannya, dan ia menghendaki mengeluarkan sebagian *borg* (lagi), sesungguhnya yang demikian itu (masih) bukan miliknya sebelum ia melunasi sebagian lain dari haknya atau pemberi hutang membebaskannya.

¹⁶ Imam Syafi’i , *Musnad Imam Syafi’i* (Beirut : Darul Fikri, 1996), Cet ke-1, h. 425.

¹⁷ Abdul Ghofur Anshori, *op.cit*, h. 97.

Jika *marhun* mengalami kerusakan karena keteledoran *murthahin*, maka *murtahin* wajib mengganti *marhun* tersebut. Tetapi jika bukan disebabkan oleh *murtahin* maka *murtahin* tidak wajib mengganti dan piutangnya tetap menjadi tanggungan *rahin*.

Jika *rahin* meninggal dunia atau pailit maka *murtahin* lebih berhak (*preferen*) atas *marhun* daripada semua kreditur. Jika hasil penjualan *marhun* tidak mencukupi piutangnya, maka *murthahin* memiliki hak yang sama bersama para kreditur terhadap harta peninggalan *rahin*.

Kematian salah satu pihak, orang yang menyerahkan barang gadai atau pemegang barang gadai, bahkan juga kematian mereka berdua, tidak berpegaruh terhadap perjanjian gadai. Perjanjian tetap berlaku sampai batas waktu yang telah ditentukan. Sepeninggal pihak-pihak bersangkutan, dilanjutkan oleh ahli waris yang bersangkutan. Barang gadai selama ada ditangan pemegang barang gadai berkedudukan sebagai amanat.

Untuk menjaga jangan sampai ada pihak-pihak yang dirugikan, dalam perjanjian gadai tidak boleh diadakan syarat, dalam perjanjian gadai tidak boleh diadakan syarat, apabila orang yang menyerahkan barang gadai (pemilik barang) tidak melunasi utangnya pada waktu yang telah ditentukan, dengan sendirinya barang gadai menjadi milik pemegang barang gadai sebagai pembayaran utang. Sebab ada kemungkinan bahwa pada waktu yang telah ditentukan untuk membayar utang itu harga barang gadai kurang dari jumlah utang yang harus dibayar, yang berakibat kerugian pada pihak pemegang barang gadai,

sebaliknya ada kemungkinan juga bahwa harga barang gadai pada waktu itu lebih besar dari dari jumlah utang yang harus dibayar, yang akan berakibat kerugian pada pihak orang yang menyerahkan barang gadai (pemilik barang).

Apabila pada waktu yang telah ditentukan orang yang menyerahkan barang gadai (pemilik barang) tidak membayar utangnya, hak pemegang barang gadai adalah menjual barang gadai. Pembelinya boleh pemegang barang gadai sendiri, tetapi dengan harga umum yang ada pada waktu itu. Dari harga penjualan barang gadai itu, hak pemegang barang gadai hanyalah sebesar piutangnya, dengan akibat bila apabila harga penjualan barang gadai lebih besar dari jumlah utang, sisanya dikembalikan kepada orang yang menyerahkan barang gadai (pemilik barang), dan apabila sebaliknya, harga penjualan barang gadai kurang dari jumlah utang, orang yang menyerahkan barang gadai (pemilik barang) masih menanggung pembayaran kekurangannya.

Barang gadai yang berkedudukan sebagai tanggungan utang itu, selama ada di tangan pemegang barang gadai hanya merupakan amanat, pemiliknya masih tetap pada orang yang menyerahkan barang gadai, meskipun tidak merupakan milik sempurna yang memungkinkan pemiliknya bertindak sewaktu-waktu terhadap miliknya itu.

Dengan demikian, pada dasarnya barang gadai tidak boleh diambil manfaatnya, baik oleh orang yang menyerahkan barang gadai sebagai pemilik maupun oleh pemegang barang gadai sebagai pemegang amanat, kecuali apabila mendapatkan izin masing-masing pihak bersangkutan. Hak pemegang barang

gadai terhadap barang gadai hanya pada keadaan atau sifat kebendaannya yang mempunyai nilai, tidak pada guna dan pemungutan hasilnya. Pemegang barang gadai hanya berhak menahan barang gadai, tidak berhak menggunakan atau memunggut hasilnya. Demikian pula orang yang menyerahkan barang gadai (pemilik barang), selama barang gadai ada ditangan pemegang barang gadai sebagai tanggungan utang, tidak berhak menggunakan barang gadai, tetapi sebagai pemilik apabila barang gadai mengeluarkan hasil maka hasil itu adalah menjadi miliknya.¹⁸

Pemegang barang gadai tidak dibenarkan menggunakan barang gadai kecuali dengan izin orang yang menyerahkan barang gadai (pemilik barang), dimaksudkan untuk menjaga jangan sampai pihak orang yang menyerahkan barang gadai dirugikan, sebab sebagai pemilik, orang yang menyerahkan barang gadai lah yang berhak menikmati hasil-hasil tambahan yang terjadi pada barang gadai selama ada di tangan pemegang barang gadai.

¹⁸ Syafi,I Jafri, *Fiqh Muamalah*, (Pekanbaru : Suska Press, 2008), Cet. ke-1, h.53.

BAB IV

KONSEP PEMANFAATAN BARANG GADAI MENURUT IBNU QUDAMAH DAN RELEVANSINYA TERHADAP BISNIS PEGADAIAN SYARIAH KONTEMPORER

A. Konsep Pemanfaatan Barang Gadai Menurut Ibnu Qudamah

I. Ketentuan Pemanfaatan

a. Barang gadaian sebagai amanat

Seperti telah dijelaskan bahwa dalam fiqih Islam, barang gadaian dipandang sebagai amanat pada tangan *murtahin*, sama dengan amanat lain, dia tidak harus membayar kalau barang itu rusak, kecuali jika karena tindakannya. Penerima gadai hanya bertanggung jawab untuk menjaga, memelihara, dan berusaha semaksimal mungkin agar barang itu tidak rusak, barang yang rusak diluar kemampuan *murtahin* tidak harus diganti.

Telah dikemukakan di atas bahwa barang jaminan adalah sebagai amanat yang tidak boleh diganggu oleh *murtahin*. Sedang biaya pemeliharaannya boleh diambil dari manfaat barang itu sejumlah biaya yang diperlukan.¹

Barang gadaian adalah amanat di tangan penerima gadaian sebab dia telah menerima barang gadaian itu dengan izin penggadai, maka yang demikian itu serupa dengan barang yang disewakan, karena iiatdak

¹ Chuzaimah T. Yanggo, Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta : PT. Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan , 2004), Cet. ke-3, h.82.

barang gadai itu kecuali jika ia lalai, sama halnya seperti dalam amanat-amanat yang lain. Jadi seandainya barang gadai itu musnah sedangkan penerima gadai tidak lalai, ia tidak wajib menanggungnya, dan jumlah hutangnya tidak boleh di potong atau dibebaskan karena barang itu adalah amanat yang ditaruh karena hutang, dan hutang tidak boleh dilenyapkan karena kemusnahan barang gadai itu, sebagaimana hal matinya orang yang menjadi saksi.²

Sebagai pemegang amanat, pemegang barang gadai, berkewajiban memelihara keselamatan barang gadai dengan cara wajar, sesuai dengan keadaan barang. Apabila pemegang barang gadai sebagai amanat itu telah memelihara barang gadai dengan sebaik-baiknya sesuai dengan keadaan barang, tiba-tiba mengalami kerusakan atau hilang, maka yang menanggung risikonya menurut pandangan ulama adalah:

Ulama-ulama Madzhab Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa pemegang barang gadai tidak menanggung resiko apapun. Ulama Madzhab Hanafi berpendapat lain, pemegang barang gadai menanggung resiko besar harga barang yang minimum, dihitung mulai waktu yang diserahkannya barang gadai kepada pemegang barang gadai sampai saat rusak atau hilang. Berbeda halnya jika rusak atau hilangnya barang gadai itu akibat kelengahan pemegang barang gadai. Dalam hal ini tidak ada perbedaan pendapat, semua ulama sepakat

² Imam Taqiyuddin Abu Bakar, *Kifayatul Akhyar*, (Surabaya : CV. Bina Imam, 1994), Cet-1, h. 587.

bahwa pemegang barang gadai menanggung resiko, memperbaiki kerusakan atau mengganti yang hilang.

b. Izin atau kesepakatan dari kedua belah pihak

Mengenai hukum penerimaan gadai dengan mengambil manfaat dari barang yang membutuhkan biaya dengan seizin yang menggadaikan adalah seperti pembagian yang sudah disebutkan sebelumnya.

Apabila yang menggadaikan memberi izin kepada penerima gadai dalam nafkah dan mengambil manfaat dengan ukurannya, maka itu boleh karena hal itu termasuk kepada salah satu macam dari macam-macam bentuk *mu'awadlah*.

Apabila barang yang digadaikan itu tidak bisa diperah dan tidak bisa ditunggangi, maka terbagi kepada dua bagian:

- a. Apabila barang yang digadaikan bukan hewan, seperti *amat* atau *abid* boleh menjadikannya sebagai *khadam*.
- b. Apabila bukan, seperti rumah, kebun, sawah dan sebagainya, maka tidak boleh mengambil manfaatnya. Contohnya seperti rumah yang runtuh kemudian dibangun oleh penerima gadai maka tidak kembali kepada pegadai sedikitpun dan tidak boleh baginya mengambil manfaatnya.³

Jenis barang gadai (*marhun*) adalah barang yang dijadikan agunan oleh *rahin* sebagai pengikat hutang, dan dipegang oleh *murtahin* sebagai

³ Ibnu Qudamah, *al-Mughni Syar alKabir*, (Beirut : Darul Fikri, tt), Cet ke-1 , h.469.

jaminan hutang, barang-barang yang dapat digadaikan adalah barang-barang yang memenuhi kategori:

- a. Barang-barang yang dapat dijual. Karena itu, barang-barang yang tidak berwujud tidak dapat dijadikan barang gadai, misalnya menggadaikan buah dari pohon yang belum berbuah, menggadaikan binatang yang belum lahir.
- b. Barang gadai harus berupa harta menurut pandangan *Syara'*, tidak sah menggadaikan sesuatu yang bukan harta seperti bangkai, hasil tangkapan seperti anjing, babi.
- c. Barang gadai tersebut harus diketahui, tidak boleh menggadaikan sesuatu yang *mahjul* (tidak dapat dipastikan ada atau tidak).
- d. Barang tersebut merupakan milik *rahin*.

Jenis-jenis Barang yang digadaikan

- a. Hewan yang bisa diperah dan ditunggangi seperti : sapi, kuda, kerbau, kambing.
- b. Perhiasan: emas, perak, mutiara.
- c. Rumah, sawah, tanah

c. Boleh menggunakan harta yang ditunggangi dan diambil susunya

Demikianlah Pendapat Ibnu Qudamah mengenai pengambilan manfaat dari barang gadaian yang pada pokoknya membagi kepada dua bagian yaitu *pertama* bagi barang yang bisa diperah susunya atau ditunggangi, maka sipenerima gadai dapat mengambil manfaat dari padanya sesuai nafkah yang

dikeluarkan. *Kedua* bagi barang yang tidak bisa diperah dan tidak bisa ditunggangi, maka penerima gadai tidak boleh mengambil manfaat dari barang gadaian tersebut.

Adapun yang menjadi alasan diperbolehkannya penerima gadai untuk mengambil manfaat dari barang gadaian yang bisa diperah dan ditunggangi ialah hadis Rasulullah Saw:

اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ر: ضِي اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
ذَا كَانَ مَرُّهُ نَادَىٰ رَبَّ لَبِّنْ رَكْبَ بِنَفَقَتِهِ وَيَشْهَدُ سَلَامُ الرَّحْمَنِ

Artinya: “Dari Abi Hurairah r.a.ia berkata, bersabda Rasulullah Saw: Gadaian dikenderai oleh sebab nafkahnya apabila ia digadaikan dan susunya diminum, dengan nafkahnya apabila digadaikan dan atas orang yang mengendarai dan meminum susunya wajib nafkahnya. (HR.Bukhari)”.⁴

Nafkah bagi barang yang digadaikan itu adalah kewajiban yang menerima gadai, karena barang tersebut di tangan dan kekuasaan penerima gadai. Oleh karena yang mengambil nafkah adalah penerima gadai, maka dia pulalah yang berhak mengambil manfaat dari barang tersebut.

d. Pemanfaatan barang gadaian oleh murtahin

Jika barang gadaian berupa rumah, kemudian orang yang menerima gadai (*al-murtahin*) berkata “aku menempati rumah ini dengan menyewakannya dan ini merupakan hak yang dapat dipindahkan”, maka yang

⁴ Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut : Darul Kitabul Ilmiah, 1992), juz 3, h. 162.

demikian itu berubah menjadi hutang dan berpindah dari gadai, meskipun disewakan kepada orang yang mengadaikan rumah tersebut. Imam Ahmad berkata dalam riwayat Ibnu Mashur ketika sebuah rumah digadaikan kemudian disewakan kepada orang yang mengadaikan rumah tersebut, maka rumah tadi statusnya tidak menjadi barang gadaian, dan ketika rumah tadi sudah kembali kepada orang yang menerima gadai maka menjadi barang gadaian lagi, adapun riwayat yang utama rumah tersebut tetap menjadi barang gadaian meskipun disewakan atau dipinjamkan oleh *murtahin* karena tetapnya penerimaan rumah tadi oleh *murtahin* dan tidak menafikan dua akad.

Sedangkan perkataan Imam Ahmad dalam riwayat al- Hasan bin tsawab menjelaskan bahwa *murtahin* memberikan izin kepada *ar-rahin* untuk menempati rumah tersebut sebagaimana dalam riwayat Ibnu Manshur karena rumah tadi tidak menjadi hak *murtahin* maka hilanglah hak untuk menempatnya, kecuali jika *murtahin* menempati rumah tadi kemudian ia meminjamkannya maka ia menjadi orang yang bertanggung jawab atas barang tersebut.⁵

Ketika *murtahin* mensyaratkan agar ia dapat memanfaatkan barang yang digadaikan, maka syarat itu adalah fasid (rusak) karena syarat tersebut menafikan sifat butuh pada barang gadaian. Al-Qadli mengatakan dari Imam Ahmad bahwa syarat tersebut diperbolehkan dalam jual beli, yakni jika dia

⁵ Ibnu Qudamah, *op. cit.*, h. 468.

murtahin berkata “aku menjual pakaian ini seharga satu dinar, dengan syarat engkau mengadaikan budakmu kepada ku untuk membantuku selama satu bulan” maka syarat tadi merupakan syarat jual beli dan sewa.

Apabila barang yang membutuhkan upah, maka hukum mengambil manfaat atas barang tersebut adalah dengan adanya ganti atau tidak adanya ganti atas izin dari pegadai (*murtahin*), Jika murtahin mendapatkan izin untuk menafkahkan, dan pengambilan manfaat dengan ketentuannya, maka dibolehkan karena merupakan bagian yang ditanggungkan. Ketika tidak ada izin maka barang gadaian tadi terbagi menjadi dua bagian. Yaitu hewan perah dan karapan dan selain keduanya. Adapun hewan perah dan kerapan itu harus diberi nafkah oleh murtahin dan ia boleh memerah susunya serta boleh menaikinya sebagaimana kadar nafkah yang ia berikan.

Dalam kitab *al- Mughni* karya Ibnu Qudamah mengatakan sebagai berikut:

محلوبايء الا ما كان مر كوا او الر هن بش هن من الامر ت ينتفع و لا
لب بقدر العلف في ركب و يح

Artinya: “Tidak boleh bagi orang yang menerima barang gadaian memakainya dengan cara apapun kecuali hewan yang ditunggangi dan perahan susu, maka ia boleh menungganginya dan memerah susu dengan sekedar ukuran memberi makanan binatang itu (tidak melebihi kapasitas)”.⁶

⁶ Ibnu Qudamah, *al- Mughni*, (Kairo : Hajar li al-Thiba’ aah, 1992), juz 6, h. 509.

Keterangan di atas menunjukkan tidak bolehnya mengambil manfaat dari barang gadaian, kecuali barang gadaian yang bisa ditunggangi atau diperah, maka bisa menunggangi atau memerah susunya. Pengecualian ini khususnya hanya bagi binatang yang bisa diperas dan ditunggangi saja, sedangkan yang lainnya tidak bisa diqiyaskan kepadanya. Tetapi walaupun demikian penerima gadai juga bisa pengambil manfaat dari barang gadaian dengan syarat: adanya izin dari yang menggadaikan.

Lebih lanjutnya Ibnu Qudamah menjelaskan yang ringkasan maksudnya bahwa pengambilan manfaat dari barang gadaian itu mencakup kepada dua keadaan.

- a. Yang tidak membutuhkan kepada biaya seperti rumah, barang-barang dan sebagainya, maka dalam keadaan ini penerima gadai tidak boleh mengambil manfaat tanpa seizin yang menggadaikan termasuk segala yang dihasilkan dan kemanfaatan barang tersebut. Karna gadai itu adalah milik orang yang menggadaikannya, demikian juga pengembangan dan pemanfaatannya sehingga selainnya tidak boleh memanfaatkannya tanpa siizinnnya.
- b. Yang membutuhkan kepada pembiayaan.⁷

Hukum pemanfaatan bagi pegadai dalam hal ini baik dengan imbalan atau tidak, harus dengan izin orang yang menggadaikan. Jika pegadai

⁷ *Ibid.* h.510.

megizinkannya untuk membiayai sekaligus memanfaatkan nya sekedarnya maka hal itu boleh karena hal ini termasuk bagian *mu'awadhoh*.⁸

Jika seseorang yang menerima gadai memanfaatkan barang gadai, baik menggunakan, mengendarai, memakai dan mengambil susunya atau menempati rumahnya, maka nilainya bisa mengurangi nilai pemanfaatan, mengurangi jumlah hutang yang menggadaikan sesuai dengan nilai pemakaian, tetapi yang penting. kesepakatan antar dua pihak kalau sudah tidak dimanfaatkan, barang tersebut nilainya bertambah. *Rahn* berpegang pada janji hutang untuk memenuhi pembayaran sesuai dengan nilai, jika si pegadai kesulitan untuk membayar hutangnya bisa dicicilkan dengan pemanfaatan barang dan pelelangan barang.

Menurut Ibnu Qudamah suatu tambahan yang muncul dari benda yang digadaikan, baik yang tidak terpisah darinya seperti naiknya harga dan keahlian membuat sesuatu jika yang digadaikan adalah hamba sahaya, ataupun sesuatu tersebut terpisah seperti anak, buah dan hasil penjualannya, maka ia diikutkan dengan benda yang digadaikan tersebut dan menjadi benda yang digadaikan juga. Dan ini berlaku untuk semua tambahan yang muncul dari benda yang digadaikan tersebut. Demikian juga seandainya benda yang

⁸ *Ibid.* h. 511.

digadaikan tersebut mengalami kerusakan atau cacat karena perbuatan yang semena-mena, maka tindakan tersebut diikuti dengan benda gadaian.⁹

Dengan demikian, apabila barang gadai berupa sebidang tanah misalnya, pemegang barang gadai tidak berhak menanaminya, kecuali dengan izin orang yang menyerahkan barang gadai (pemilik barang). Dalam hal orang yang menyerahkan barang gadai (pemilik barang) harus diberikan sebagian hasilnya, seperti ketentuan-ketentuan yang berlaku pada perjanjian bagi hasil. Berbeda halnya apabila barang gadai berupa binatang yang pemeliharaannya memerlukan biaya. Apabila biaya itu dikeluarkan pemegang barang gadai, ia berhak menggunakan dan memunggut hasil binatang gadai itu untuk dikendarai, diperah susunya dan sebagainya yang dipandang sebagai imbalan dan biaya pemeliharaan yang telah dikeluarkan pemegang barang gadai.

Oleh karenanya, dalam menikmati hak manfaat binatang gadai itu, pemegang barang gadai harus memperhatikan keseimbangan antara besar biaya yang dikeluarkan dengan hasil dan manfaat lebih dari biaya yang dikeluarkan, maka selisihnya adalah menjadi hak orang yang menyerahkan barang gadai (pemilik barang), yang apabila tetap ada ditangan pemegang barang gadai, harus digabungkan kepada barang gadai milik orang yang menyerahkan barang gadai itu.

⁹ Ibnu Qudamah, *op.cit.* , h. 471.

Imam Syafi'i dan Imam Malik sependapat bahwa manfaat dari barang gadai itu adalah hak yang menggadaikan (pemilik barang). *Murtahin* tidak dapat mengambil manfaat daripadanya, kecuali atas izin dari pihak yang menggadaikan.

Imam Ahmad berpendapat bahwa penerima gadai tidak dapat mengambil manfaat dari barang gadaian apabila barang yang digadaikan itu hewan yang tidak bisa ditunggangi dan diperah. Sedangkan apabila barang yang digadaikan itu hewan yang dapat mengambil manfaat dengan menunggangi dan memerah susunya sesuai dengan biaya pemeliharaan yang telah dikeluarkan.

Ulama Hanafiah melarang *murtahin* memanfaatkan barang gadai, seperti menjual atau meminjamkan tanpa seizing *rahin* hal ini disebabkan oleh *murtahin* yang tidak mempunyai hak kepemilikan terhadap barang gadai, sehingga tidak dapat memanfaatkan yang bersifat menghilangkan materi barang gadai.

e. Pemanfaatan barang gadai oleh rahin

Status *rahin* dalam transaksi akad gadai adalah pemilik barang. Namun kepemilikan itu dibatasi oleh hak *habsu* (hak menahan barang gadai) oleh *murtahin*. Oleh karena itu, dalam perjanjian gadai maka *rahin* tidak mempunyai hak penuh untuk memanfaatkan barang miliknya yang telah digadaikan.¹⁰

¹⁰ Zainudin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), Cet. ke-1, h.31.

Pemilik barang masih tetap berhak mengambil manfaatnya dari barangnya yang dijamin, bahkan manfaatnya tetap kepunyaan pemiliknya dan kerusakan menjadi tanggungan pemilik. Tetapi usaha untuk menghilangkan miliknya dari barang itu (jaminan), mengurangi harga, menjual atau mempersewakannya tidak sah tanpa izin yang menerima jaminan. Kecuali barang yang digadaikan itu adalah budak maka, tidak boleh mengambil manfaatnya.¹¹

Jenis pemanfaatan barang gadai yang dilarang adalah pemanfaatan yang mengurangi nilai barang gadai, seperti membangun gedung atau mengolah tanah yang masih dalam status gadai. Namun pemanfaatan seperti itu pun dibolehkan apabila rahin mengizinkan. Bentuk pemanfaatan barang gadai yang menjadi pokok pembicaraan para ulama fikih adalah pemanfaatan yang bersifat *tasarrufat*, yaitu pemanfaatan yang dapat menghabiskan atau menghilangkan nilai materil dari barang yang menjadi objek transaksi.¹²

Berdasarkan dari beberapa pendapat ulama, bahwa menelantarkan barang gadai tanpa dimanfaatkan oleh penerima gadai adalah bertentangan dengan tujuan syariat Islam. Bahkan dapat mengurangi atau merusak nilai materiil dari barang gadai yang menjadi objek akad. Oleh karena itu, pemanfaatan atas barang gadai merupakan sesuatu yang seharusnya dilakukan

¹¹ Ibnu Qudamah, *op. cit*, h.472.

¹² *Ibid.* h. 33.

oleh penerima gadai. Namun para ulama hanya berbeda pendapat dalam hal mekanisme pemanfaatan barang gadai, yaitu dalam pemanfaatan harta gadai tidak dapat merugikan hak masing-masing pihak.

Oleh karena itu, dalam akad gadai, *rahin* tetap memiliki hak milik atas *marhun* sedangkan *murtahin* memiliki hak menahan marhun sebagai jaminan pelunasan utang. Dengan demikian, pemanfaatan oleh *rahin* atas *marhun* digantungkan kepada izin dari *murtahin*. Jadi ketika *murtahin* mengizinkan dan menganggap pemanfaatan yang dilakukan oleh *rahin* tersebut tidak akan menghilangkan kepemilikan dari *marhun*, maka yang dilakukan *rahin* tersebut diperbolehkan menurut *syara'*.¹³

Sabda Rasulullah Saw. dalam HR. Syafi'i.

به الذي لا يخلق الرهن من صاح: وسلم عليه صلى الله قال رسول الله
رهنه له غنمه و عليه غرمه

Artinya: “Janganlah ia (pemegang gadaian) menutup hak gadaian dari pemiliknya (*rahin*) yang menggadaikan. Ia (*murtahin*) berhak memperoleh bagiannya dan dia (*rahin*) berkewajiban membayar gharamahnya”.¹⁴

Dari hadis diatas jelaslah bahwa si pemilik benda berhak mengambil manfaat benda yang telah diborgnya (jaminan) dan ia menanggung resiko atas kerusakan benda jaminan itu.

¹³*Ibid.* h. 34.

¹⁴ Imam Syafi'i, *Musnad Imam Syafi'i* (Beirut : Darul Fikri, 1996), Cet ke-1, h. 425.

Karena sesuatu yang digadaikan tersebut adalah milik penggadai, maka ia yang menanggung biaya perawatannya. Ia juga menanggung biaya gudang yang digunakan untuk menyimpan barang gadaian serta biaya penjagaannya. Karena semua itu masuk dalam biaya perawatannya. Ia juga menanggung biaya pengembalaan hewan ternak yang digadaikan.

Jika sebagian benda yang digadaikan rusak dan sebagian lagi tidak rusak, maka sebagian yang tidak rusak adalah gadai untuk semua utang, karena utang tersebut berkaitan dengan semua bagian benda yang digadaikan. maka apabila sebagiannya rusak, sebagian lain pun menjadi jaminan untuk semua utang.

Jika penggadai membayar sebagian utangnya, maka tidak ada bagian pun yang terlepas dari benda yang digadaikan hingga ia membayar semua utangnya. Jika tiba masa pelunasan utang yang dijamin dengan gadaian, maka pengutang wajib melunasinya sebagaimana utang yang tidak ada gadainya, karena inilah konsekuensi dari akad yang mereka lakukan.¹⁵

Jika pegutang tidak mau melunasi utangnya, maka ia termasuk orang yang mengulur-ngulurkan pelunasan utang. Dalam hal ini, penguasa memaksanya untuk melunasi utangnya tersebut. Lalu jika tetap tidak mau melunasinya, maka ia dipenjara dan dihukum hingga melunasinya atau menjual

¹⁵ Saleh al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, (Jakarta : Gema Insani, 2006), Cet ke-2, h.417.

benda yang digadaikan untuk melunasi utangnya dengan hasil penjualan tersebut, karena itu adalah kewajiban yang harus ditunaikan penghutang.¹⁶

B. Relevansi Pandangan Ibnu Qudamah Tentang Pemanfaatan Barang Gadai Terhadap Bisnis Pegadaian Syariah Kontemporer

Dalam hukum perdata Islam, harta disebut dengan istilah *al-mall*. Para ahli hukum Islam memberikan pengertian harta adalah nama bagi yang selain manusia yang ditetapkan untuk kemaslahatan manusia, dapat dipelihara pada suatu tempat, dapat dilakukan *tasharruf* dengan jalan biasa.

Berdasarkan definisi di atas dapat diketahui bahwa sesuatu dapat disebut harta, apabila telah memenuhi dua hal, yaitu:

- a. Kemungkinan dapat dikuasai
- b. Kemungkinan dapat diambil manfaatnya menurut cara yang terbiasa.

Dengan demikian, segala sesuatu yang dapat dikuasai dan dapat diambil manfaatnya secara nyata dan positif, dapat dipandang sebagai harta. Contoh benda-benda yang kita miliki, baik itu berupa tanah perkarangan, sawah rumah, barang-barang, binatang dan uang. Demikian pula barang-barang yang belum dapat dikuasai dan belum dapat dimanfaatkan, tetapi

¹⁶ *ibid*,h.418.

terdapat kemungkinan terwujudnya penguasa dan pemanfaatan itu, maka barang tersebut juga termasuk harta.¹⁷

Harta *'ain* ialah harta yang berbentuk benda, seperti rumah, pakaian, beras, kendaraan (mobil), dan yang lainnya. Harta *'ain* terbagi menjadi dua yaitu *Pertama* harta *'ain dzati qimah* merupakan benda yang memiliki bentuk yang dipandang sebagai harta karena memiliki nilai. *Kedua* harta *'ain gharri dzati qimah* yaitu merupakan benda yang tidak dapat dipandang sebagai harta karena tidak memiliki harga. Sedangkan harta *dayn* merupakan sesuatu yang berada dalam tanggung jawab.

Selanjutnya apabila konsep pemanfaatan barang gadai menurut Ibnu Qudamah kita bandingkan dengan konsep pemanfaatan barang gadai syariah kontemporer, kita akan menemukan titik persamaan antara konsep pemanfaatan barang menurut Ibnu Qudamah dengan pegadaian sekarang. Bahwa pemanfaatan barang gadai syariah secara umum mempunyai nilai persamaan dengan konsep pemanfaatan yang ada dalam Islam.

Disamping mempunyai nilai persamaan antara konsep pemanfaatan barang gadai dengan pegadaian sekarang tentunya juga terdapat perbedaan antara keduanya, walaupun perbedaan tersebut tidak begitu banyak dalam operasionalnya.

Berawal dari terdapatnya titik persamaan antara konsep pemanfaatan barang gadai menurut Ibnu Qudamah dengan konsep pemanfaatan sekarang,

¹⁷ Syafi'I Jafri, *Fiqh Muamalah*, (Pekanbaru : Suska Press, 2008), Cet. ke-1, h.6.

penulis setelah membaca dan menganalisa, maka penulis juga mengemukakan bentuk-bentuk yang terdapat antara konsep pemanfaatan barang gadai menurut Ibnu Qudamah dengan pemanfaatan barang gadai yang ada di lembaga pegadaian sekarang.

Dalam prakteknya sesuai dengan pembagian harta di atas, ada harta yang berupa *'ain* (barang) dan ada harta yang berupa *dain* (*finance*) atau sertifikat atau surat berharga juga berlaku di lembaga-lembaga pegadaian, baik itu lembaga pegadaian yang khusus ataupun lembaga lainnya seperti perbankan yang memiliki produk gadai. Oleh karena itu di lembaga pegadaian sekarang barang yang digadaikan tidak hanya barang-barang yang tertentu, seperti rumah, tanah, kendaraan, tetapi juga yang digadaikan berupa surat-surat berharga atau sertifikat kepemilikan yang menunjuk kepada barang yang dimiliki.

Dalam prakteknya di pegadaian sekarang barang yang digadaikan *rahin* tidak boleh dimanfaatkan tetapi cukup disimpan di tempat yang aman, akan tetapi jika yang digadaikan surat-surat berharga barang yang disandarkan kepada surat tersebut masih bisa dimanfaatkan, seperti seseorang menggadaikan sertifikat rumah, maka rumah yang digadaikan tersebut masih bisa ditempati dan dimanfaatkan oleh penggadaai, sampai waktu jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi utangnya dan apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya maka barang gadai lelang, hasil penjualan barang tersebut digunakan untuk melunasi utang.

Adapun jika gadai dilakukan tanpa melalui lembaga gadai resmi atau lembaga keuangan resmi maka sifatnya lebih dinamis. Jika ada kesepakatan antara kedua belah pihak untuk boleh memanfaatkan maka barang boleh dimanfaatkan, baik oleh *rahin* maupun oleh *murtahin*.

Jadi dalam hal ini dapat dikemukakan, bahwa setelah mengadakan penganalisaan atas keterangan-keterangan diatas, maka penulis dapat mengatakan bahwa dalam konsep pemanfaatan barang gadai di lembaga pegadaian syariah mempunyai titik persamaan dengan konsep pegadaian menurut Ibnu Qudamah yaitu *pertama* terletak pada akadnya. Akad gadai adalah akad *tabarru'* (kebajikan), sebab pinjaman yang diberikan oleh murtahin tidak dihadapkan dengan sesuatu yang lain.

Berbeda dengan jual beli yang merupakan akad *mu'awadah* (pertukaran) diantara penjual dan pembeli yang melakukan pertukaran harta dengan barang, atau barang dengan barang. Akad *tabarru'* dalam konsep Fiqih Muamalah meliputi akad *hibah*, *ji'alah* (pinjam-meminjam), *wadiah* (titipan), *qard* dan *rahn*. *Kedua* dari segi pemanfaatan barang gadai menurut Ibnu Qudamah, barang yang digadaikan seperti rumah, kebun, sawah, dan sebagainya maka tidak boleh diambil manfaatnya hal ini pun terjadi pada pegadaian kontemporer. *Ketiga*, pemilik barang masih tetap berhak mengambil manfaat yang dijamin, bahkan manfaatnya tetap kepunyaan pemiliknya dan kerusakan menjadi tanggungan pemiliknya namun kepemilikan itu dibatasi oleh hak *habsu* (hak menahan barang gadai) oleh murtahin. Hal ini juga terjadi pada

pegadaian kontemporer, sebagaimana dijelaskan pada Fatwa DSN MUI yang berkenaan dengan gadai syariah.

Disamping itu juga mempunyai perbedaan yang terletak pada *marhun* (barang yang digadaikan), konsep Ibnu Qudamah mengatakan bahwa barang yang digadaikan berupa hewan boleh diambil manfaatnya dengan cara memeras susu dan menungganginya, tetapi hewan yang tidak bisa diperas dan ditunggangi bisa diambil manfaatnya dengan syarat ada izin dari orang yang mengadaikan. Barang yang digadaikan menurut Ibnu Qudamah boleh dimanfaatkan dikarenakan untuk biaya pemeliharaan dan perawatan seperti kuda, sapi, kambing. Pada pegadaian kontemporer pemanfaatan barang gadai diaplikasikan sebagai biaya untuk penyimpanan dokumen dari rahin sebagai jaminan barang yang digadaikan.

Sedangkan pegadaian kontemporer barang yang digadaikan tidak bisa dimanfaatkan, hanya disimpan ditempat yang aman, selain itu juga barang yang digadaikan hanya barang-barang tertentu seperti kendaraan, rumah, surat berharga.

Disamping itu juga konsep pemanfaatan barang gadai menurut Ibnu Qudamah sangat relevan terhadap lembaga pegadaian sekarang. Dimana masing-masing mempunyai cara yang sama dan mempunyai konsep yang sama pula.

Analisa penulis *murtahin* diperbolehkan menaiki *rahn* (barang gadai) yang dapat dinaiki serta memerah *rahn* yang dapat diperah, tetapi harus berlaku

adil yakni harus sesuai dengan jumlah biaya yang dikeluarkannya untuk memelihara *rahn* dan tidak boleh mengambil manfaat darinya dengan memerahnya melebihi jumlah biaya pemeliharaan yang dikeluarkannya.

Jika *murtahin* mengeluarkan biaya untuk pemeliharaan binatang gadaian tanpa meminta izin kepada *rahin*, maka tidak boleh meminta ganti kepada *rahin*. Tetapi jika alasan meminta ganti kepada *rahin*, jika saat mengeluarkan biaya berniat akan meminta ganti kepada *rahin*. Jika tidak meniatkannya, maka ia tidak boleh menganti kepada *rahin*, karena seseorang yang mengerjakan suatu amal dengan suka rela tidak sepatutnya meminta ganti atas amal yang telah dikerjakan.

Barang yang digadaikan harus berada di bawah tangan *murtahin* dan bukan ditangan *rahin*. Jika *rahin* memintanya dari *murtahin*, maka hal itu dibolehkan baginya. Sedangkan jika *murtahin* mengembalikannya atas kehendak sendiri, maka itu adalah haknya. Barang yang tidak sah dijual, tidak sah digadaikan, kecuali tanaman dan buah-buahan yang belum matang, karena menjual keduanya dalam keadaan belum matang diharamkan, dan menggadaikan keduanya diperbolehkan dengan alasan bahwa didalamnya tidak mengandung unsure penipuan terhadap *murtahin*, karena hutangnya masih tetap menjadi tanggungan, meskipun tanaman dan buah-buahan yang digadaikan mengalami kerusakan.

Jika waktu penggadaian telah habis, maka *murtahin* berhak menagih hutang kepada *rahin*. Jika *rahin* melunasinya, maka barang gadaian harus

dikembalikan kepadanya. Sedangkan jika *rahin* tidak mampu melunasinya, maka *murtahin* berhak mengambil piutangnya dari hasilnya, jika ada. Tetapi jika tidak ada, maka *murtahin* harus mengembalikan lebihnya kepada *rahin*. Tetapi jika harga penjualannya tidak dapat melunasi hutang *rahin*, maka kekurangannya merupakan tanggungan *rahin*.

Barang gadaian merupakan amanat yang berada di bawah kekuasaan *murtahin*, sehingga apabila barang tersebut rusak karena kecerobohan atau perbuatannya yang melampaui batas, maka ia harus bertanggung jawab. Sedang jika rusak namun bukan karena kecerobohannya atau perbuatannya yang melampaui batas, maka ia tidak bertanggung jawab apapun, dan hutang masih tetap tanggungan *rahin*.

Jika *rahin* meninggal atau bangkrut, maka *murtahin* lebih berhak atas barang gadaian daripada sejumlah pemberi hutang lainnya. Sehingga saat pembayaran hutang telah jatuh tempo, maka *murtahin* berhak untuk menjualnya dan mengambil piutangnya dari hasil penjualannya. Jika hasil penjualannya melebihi piutangnya, maka *murtahin* harus mengembalikan uang selebihnya kepada ahli warisnya. Jika tidak mencukupi, maka ia mempunyai hak yang sama dengan para pemberi hutang yang lainnya.

Dibolehkan bagi seseorang untuk menggadaikan bagiannya dalam sesuatu yang dimiliki olehnya dan oleh orang lain. Karena ia boleh menjual bagiannya tersebut ketika datang waktu pelunasan utang lalu melunasi utang dengannya. Dan seorang pembeli boleh menggadaikan sesuatu yang ia beli

untuk melunasi pembayarannya. Karena pembayaran tersebut adalah utang yang menjadi tanggungannya dan barang yang ia beli tersebut adalah miliknya, sehingga ia pun boleh menggadaikannya. Jika seseorang membeli rumah atau mobil misalnya, dengan pembayaran yang ditangguhkan ataupun pembayaran langsung namun belum diterima oleh penjual, maka pembeli boleh menggadaikannya hingga ia membayarnya.

Masing-masing pihak penggadai maupun penerima gadai, tidak boleh melakukan apapun terhadap sesuatu yang ia gadaikan kecuali dengan seizing pihak lain, maka ia menghilangkan haknya. Hal ini dikarenakan tindakan orang yang mengutang terhadap benda yang digadaikan menghilangkan hak orang yang memberi pinjaman terhadap benda tersebut adalah tindakan seseorang terhadap milik orang lain.

Adapun mengambil manfaat dari benda yang digadaikan, maka tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Jika mereka sepakat untuk menyewakannya dan sebagian, maka itu dibolehkan, namun jika tidak ada kesepakatan antara mereka maka tidak boleh menggunakan benda tersebut hingga selesai masa penggadain.

Dan orang yang menggadaikan boleh melakukan sesuatu untuk kebaikan benda yang digadaikan, seperti menyiram, melakukan penyerbukan buatan, dan mengurusnya jika yang digadaikan tersebut adalah pohon. Biaya perawatan sesuatu yang digadaikan tersebut adalah hewan ternak, atau yang lainnya, ditanggung oleh orang yang menggadaikannya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah penulis mengadakan penganalisaan terhadap masalah konsep pemanfaatan barang gadai menurut Ibnu Qudamah dan relevansinya terhadap bisnis pegadaian kontemporer, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep pemikiran Ibnu Qudamah tentang pemanfaatan barang gadai adalah:
Ibnu Qudamah menyatakan bahwa penerima gadai tidak boleh mengambil hasil atau manfaat dari barang gadaian sedikitpun kecuali dari yang bisa ditunggangi dan diperah, tetapi penerima gadai bisa juga mengambil manfaat dari barang gadaian dengan syarat ada izin dari yang mengadaikan, adanya gadai bukan sebab mengutangkan.
2. Relevansi pandangan Ibnu Qudamah tentang konsep pemanfaatan barang gadai terhadap bisnis pegadaian kontemporer: Berawal dari titik persamaan dan perbedaan antara konsep pemanfaatan barang gadai menurut Ibnu Qudamah dengan konsep pemanfaatan barang gadai sekarang bahwa dilembaga pegadaian sekarang barang yang digadaikan hanya barang-barang tertentu. Seperti rumah, tanah masih bisa dimanfaatkan oleh *rahin*, karena yang digadaikan bukan barang tersebut melainkan berupa surat. Pada

pegadaian kontemporer pemanfaatan barang gadai diaplikasikan dengan biaya penyimpanan dokumen yang dikenakan untuk rahin.

B. Saran

Setelah penulis meneliti dan membahas Konsep pemanfaatan barang gadai menurut Ibnu Qudamah, penulis menyatakan:

1. Dengan semakin pesatnya perkembangan ekonomi sekarang, dewasa ini masyarakat semakin yakin bahwa dalam dunia dalam dunia bisnis, usaha dagang atau usaha komersial dalam dunia perdagangan, mereka selalu memakai konsep sekarang.
2. Kemudian bagi para cendekiawan muslim, hendaknya dapat meneliti lebih lanjut pendapat-pendapat lain dari Ibnu Qudamah agar dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman, ketentuan pendapat tentang ekonomi islam, serta pendapat lain tentang teori ekonomi masa sekarang.

DAFTAR PUSTAKA

Aedy, Hasan, *Indahnya Ekonomi Islam*, CV. Alfabeta, Bandung, 2007.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, CV. Diponegoro, 2000,
Cetakan I.

Kamal Mustafa, *Wawasan Islam dan Ekonomi Sebuah Bunga Rampai*, Fakultas
Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.

Muhammad, *Model-model Akad di Bank Syari'ah (Panduan Teknis Pembuatan
Akad / Pembiayaan Pada Bank Syari'ah*, UII Press, Yogyakarta, 2009

Triwulan, Tutik, Titik dan Idris, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Lintas
Pustaka, Jakarta, 2008.

Syhadie, Zaeni, *Hukum Bisnis dan Pelaksanaannya di Indonesia*, PT. Raja
Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

Rianto, Rustam, Bambang SE, MM, AK, *Perbankan Syari'ah*, Muntaz
Cendikia Prees, Pekanbaru, 2005.

Zulkifli, *Sunarto, Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syari'ah*, Zikrul Hakim,
Jakarta, 2003.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Juliana dilahirkan di desa Sintong Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Tanggal 20 Juli 1988. Lahir dari pasangan Hamid AN dan rohaina dan merupakan anak ke 2 dari 4 bersaudara. Penulis memulai Pendidikan Dasar Pada Tahun 1994-2000 kemudian melanjutkan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Pada Tahun 2000-2003. Selanjutnya Penulis melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas Pada Tahun 2003-2006.

Pertengahan 2006 tepatnya bulan Juli penulis meneruskan Pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau mengambil Jurusan Ekonomi Islam Prodi Perbankan Syariah Strata Satu (SI). Pada bulan Februari-Maret 2009 penulis melaksanakan Magang pada PT. Bank Riau Bagan Siapiapi.

Setelah Magang penulis mengajukan judul Skripsi dengan judul “ **KONSEP PEMANFAATAN BARANG GADAI MENURUT IBNU QUDAMAH DAN RELEVANSINYA TERHADAP BISNIS PEGADAIAN SYARIAH KONTEMPORER**” di bawah bimbingan Bapak Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag berdasarkan hasil ujian Sarjana Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum pada tanggal 10 Juni 2010 dinyatakan “**Lulus**” dengan predikat Sangat Memuaskan dan menyandang Gelar Sarjana Ekonomi Islam (SE.I)